

E-newsletter

NOVEMBER II 2020

PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



**AHLAN
WA SAHLAN
HABIB RIZIEQ**



Menangkap Gelombang Kegelisahan

Fraksi PKS memandang HRS sebagai warga negara yang merdeka adalah hak beliau untuk kembali ke Indonesia. Sebaliknya pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak setiap warga negara baik diminta atau tidak sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan

Habib Rizieq Shihab (HRS) bagaimanapun saat ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebangsaan kita. ulama yang mampu menggerakkan orang banyak, sebuah energi yang harus ditangkap secara positif. Namun ironisnya, beliau seakan menjadi wajah yang berlawanan dengan kehendak penguasa, bahkan kerap dianggap pengganggu bagi para 'fans boy dan influence'. Termasuk melakukan 'gangguan dan keracauan' hingga sekembalinya HRS pada tanggal 10 November 2020 di Jakarta, setelah hijrah panjang 3,5 tahun di kota suci Mekah.

Jika dicermati, padahal apa yang dilakukan oleh HRS

selama ini bukan sesuatu yang baru. Karena HRS hampir disemua rezim melakukan dakwah 'amar maruf nahyi munkar'. Malah HRS di jaman SBY masuk jeruji penjara atas apa yang dilakukannya akibat dakwah 'hard approach' di Monas kala itu. Dari tempat itu pula pada akhirnya beberapa tahun kemudian HRS menjelma menjadi 'koentiji' gelombang kegelisahan publik terhadap penegakan hukum dan gerakan keagamaan.

Namun waktu terus berlalu, hingga secara tertib transformasi terjadi di tubuh HRS secara khusus dan FPI pada umumnya. Mereka berkerja hingga ke kantung-

kantung masa dan ke pipa kapiler umat. Bukan hanya mengisi taklim, namun juga menjadi relawan paling depan bencana dan pengentasan dhuafa. Tidak jarang dalam perjalanannya berkolaborasi dan bersinergi dengan TNI maupun Polri, hingga berbagai institusi resmi. Maka wajarlah jika pada moment penjemputan kemarin ada adegan euforia dari Prajurit, petugas apron pesawat dan elemen masyarakat lainnya. ironisnya atas ekspresi tersebut disikapi dengan berlebihan dengan teguran hingga penahanan.

Jika pada hal yang standar dan terukur saja Pemerintah nampak kesulitan menemukan

cara terbaik berkomunikasi dengan HRS, jika dibiarkan berlalu-lalu maka akan berdampak kepada kemampuan menyatukan pandangan. Hampir saja Pemerintah terjebak terus menerus nyaman dengan narasi konfrontatif saat HRS pulang oleh para pendengung (influencer), seperti senang dikipas-kipas berbekal masa lalu FPI. Selama ini Pemerintah nampak terlalu percaya diri (over confident) dalam menghalau oposisi dan narasi yang penuh negasi, cenderung meremehkan. Bisa saja orang-orang yang menyambut HRS dianggap sebagai riak, namun jika tidak cermat membaca kegelisahan bisa menjadi

gelombang.

Fraksi PKS memandang HRS sebagai warga negara yang merdeka adalah hak beliau untuk kembali ke Indonesia. Sebaliknya pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak setiap warga negara baik diminta atau tidak sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kita sambut beliau kembali ke tanah air, ahlan wa sahan wa marhaban. Sembari kita tunggu kiprah konstruktif beliau bagi umat, bagi rakyat, dan bagi bangsa sekembalinya ke tanah air.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Ahlan wa Sahlan
***Habib Muhammad Rizieq
bin Hussein Shihab, Lc., M.A., DPMSS.***
Selamat datang kembali ke tanah air

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Foto di Makkah
Sebelum
masa Pandemi

Pimpinan PKS Silaturahmi ke Kediaman HRS

Habib Salim: 3,5 Tahun Menahan Rindu

Kita semua bersyukur dengan kehadiran beliau. Selama 3,5 tahun kita menahan rindu. Apakah ada gerangan yang mau meminjamkan sayapnya, aku harapkan dengan sayap itu aku bisa terbang menemui yang aku cintai.

Habib Dr. SALIM SEGAF ALJUFRI, MA

Ketua Majelis Syuro PKS

Jakarta (11/11) — Pimpinan DPP Partai Keadilan Sejahtera silaturahmi ke kediaman Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Presiden PKS Ahmad Syaikhul menyebutkan ke depan Indonesia akan lebih baik lagi dengan melakukan revolusi akhlak.

"Insya Allah ke depan Indonesia, seperti Habib Rizieq, akan mengedepankan revolusi akhlak agar ke depan Indonesia lebih baik lagi," kata Syaikhul di kediaman Habib Rizieq, Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).

Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Aljufrie mengungkapkan kerinduannya dan kepulangan Habib Rizieq.

"Kita semua bersyukur dengan kehadiran beliau. Selama 3,5 tahun kita menahan rindu," ungkap Habib Salim.

"Apakah ada gerangan yang mau meminjamkan sayapnya, aku harapkan dengan sayap itu aku bisa terbang menemui yang aku cintai," imbuh Habib Salim menggunakan syair masyhur.

Habib Rizieq pum tersenyum tersipu malu. Ia dan beberapa pengurus FPI menyambut hangat kehadiran PKS.

Sementara itu, Imam Besar FPI Habib Rizieq mengapresiasi kehadiran PKS di kediamannya Petamburan Jakarta Pusat.

"Saya mengapresiasi

kehadiran Partai Keadilan Sejahtera yang menyedhiakan diri bersilaturahmi. Jazakumullah ahsanal jaza'. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan memperkuat persaudaraan di antara kita dan bisa membangun kerja sama," ungkap Habib Rizieq.

"Untuk membangun bangsa ini kita semua harus saling menghormati, saling menghargai dalam rangka untuk membangun persatuan-persatuan bangsa," imbuhnya.

Selain Habib Salim dan Syaikhul, hadir juga Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman dan Wakil Majelis Syura Ahmad Heryawan.



Presiden PKS: Ahlan Wa Sahlan Habib Rizieq

Ahlan Wa Sahlan Ya Habib Rizieq. Keluarga besar PKS merasa gembira dan menyambut baik kedatangan beliau. Semoga beliau dan keluarga sehat wal 'afiat.

Mari kita jahit baju kebangsaan lagi. Kita jadikan momentum kepulangan beliau untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa

H. AHMAD SYAIKHU

Presiden PKS

Jakarta (10/11) — Presiden PKS Ahmad Syaikh (Asyik) menyambut baik kedatangan Habib Rizieq Shihab di Tanah Air.

"Ahlan Wa Sahlan Ya Habib Rizieq. Keluarga besar PKS merasa gembira dan menyambut baik kedatangan beliau. Semoga beliau dan keluarga sehat wal 'afiat," kata Asyik usai bertemu tokoh dan ulama di Lampung, Selasa, (10/11).

Menurut Asyik, kehadiran Habib Rizieq Shihab harus

dijadikan momentum untuk merekatkan persatuan dan kesatuan. Sekaligus juga untuk menjahit baju kebangsaan kembali.

"Mari kita jahit baju kebangsaan lagi. Kita jadikan momentum kepulangan beliau untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa," kata Asyik.

Asyik berharap, semua pihak ikut menyambut baik kehadiran Habib Rizieq. Sebagai Warga Negara Indonesia yang sah, Habib

Rizieq berhak mendapatkan perlindungan.

"Kami berharap hak-hak beliau sebagai warga negara dihormati dan dilindungi," harap Asyik.

Dia juga meminta agar semua pihak bersikap Arif dan bijaksana.

"Mari kita sebagai bangsa melihat ke depan dengan sikap yang arif dan bijaksana demi kebaikan bangsa," harap Asyik lagi.



Soal Rencana Kepulangan HRS

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini: Negara Harus Melindungi Warganya

“Sebagai warga negara yang merdeka adalah hak beliau untuk kembali ke Indonesia. Sebaliknya pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak setiap warga negara baik diminta atau tidak—sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan”

Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Rencana kepulangan Habib Rizieq Syihab (HRS) sebaiknya tidak dipolemikkan agar suasana politik tetap kondusif. Demikian dikatakan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menjawab pertanyaan sejumlah media.

“Sebagai warga negara yang merdeka adalah hak beliau untuk kembali ke Indonesia. Sebaliknya pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak setiap warga negara baik diminta atau tidak—sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-

undangan,” tandasnya.

Lebih lanjut Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, semua pihak sebaiknya menahan diri dari komentar yang menyulut polemik seputar kepulangan HRS. Kalau pun perlu komentar yang menyejukkan saja.

“Kita sambut beliau kembali ke tanah air, ahlan wa sahlan wa marhaban. Sambari kita tunggu kiprah konstruktif beliau bagi umat, bagi rakyat, dan bagi bangsa sekembalinya ke tanah air,” pungkas Jazuli.



Foto : Momen Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini saat bertemu Habib Rizieq Syihab pada 2018 lalu.



Sebagai Momentum Kuatkan Komitmen Etika Berbangsa dan Bernegara

HNW Usulkan Mahfud MD Datangi HRS

Publik serta Umat menyambut baik kegiatan silaturahmi yang sangat menyejukkan itu, yang bisa membuka pintu-pintu kebaikan yang bermanfaat bagi harmoni kehidupan keumatan, berbangsa dan bernegara,"

Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

Jakarta (10/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang juga merupakan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Pemerintah, tokoh politik dan tokoh bangsa menjadikan kepulauan Habib Rizieq Shihab dengan aman dan selamat ke Indonesia, sebagai momentum menguatkan komitmen menegakkan etika/moral/akhlaq berkeumatan, berbangsa dan bernegara.

Apalagi, kata pria yang akrab disapa HNW, HRS sudah menegaskan secara terbuka bahwa kepulungannya dalam rangka Revolusi Akhlak, Pemerintah pun juga punya program Revolusi Mental, dan Rabu, (11/11) MPR juga akan menggelar Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa dalam rangka pembentukan

Mahkamah Etik.

"Salah satu bentuk etika/moral/akhlaq adalah mengokohkan prinsip dan praktek bersilaturahmi. Saling berkunjung dan menyapa dengan spirit dan semangat persahabatan dan persaudaraan," ungkap HNW.

Silaturahmi, lanjut HNW, merupakan tradisi ketimuran yang juga bagian dari ajaran Agama. Apalagi sinyal-sinyal tersebut sudah disampaikan dan ternyata berdampak sangat positif dengan terselenggaranya kepulauan HRS secara aman, lancar dan damai. Tidak sebagaimana dibayangkan semula yang dipenuhi ancaman dan disinformasi.

"HRS sudah menyampaikan sinyal yang sangat jelas, saat2 terakhir di Mekah, HRS

menegaskan bahwa kepulungannya ke Indonesia karena Beliau tidak memusuhi Negara Indonesia juga tidak memusuhi TNI. Melainkan kepulauan HRS untuk melakukan Reformasi Akhlak," tegas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Pemerintah juga, imbuh HNW, akhirnya melalui Menko Polhukam, menyambut dengan penegasan yg menenteramkan yaitu: untuk melindungi hak HRS sebagai WNI, mengizinkan pendukung HRS untuk menjemput asal tertib, dan agar aparat mengawal tidak dengan berlebihan, tidak boleh berlaku represif, dan agar mengawal HRS hingga tiba di kediaman dengan aman dan selamat.

"Alhamdulillah itulah yang terjadi. Dan itu sangat dipujikan oleh FPI dan publik. Karena mendinginkan suasana dan menghindari terjadinya konflik, yang bisa jadi itulah yang diinginkan provokator, untuk langgengkan konflik antara Umat Islam dengan Aparat/Pemerintah. HRS pun dalam orasi di depan jemaahnya saat berada di kediamannya di Petamburan juga mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih kepada Pak Mahfud MD karena



sikap akhirnya yang bijaksana itu. Alhamdulillah," ujar HNW.

Kondisi kondusif dan konstruktif untuk Umat, Bangsa dan Negara seperti ini, imbuhnya, penting dijaga dan ditindaklanjuti, dengan misalnya Prof Mahfud MD sebagai Menkopolhukam mengunjungi HRS di kediamannya, sebagaimana sebelumnya Menkopolhukam juga mengunjungi Syekh Ali Jaber, da'i dan ulama hafidz Al-

Qur'an yang menjadi korban penusukan saat Dakwah di Lampung.

"Publik serta Umat menyambut baik kegiatan silaturahmi yang sangat menyejukkan itu, yang bisa membuka pintu-pintu kebaikan yang bermanfaat bagi harmoni kehidupan keumatan, berbangsa dan bernegara," jelasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Pimpinan PKS Silaturahmi ke Kediaman Habib Rizieq Shihab di Petamburan

Jakarta (11/11) --- Pimpinan DPP Partai Keadilan Sejahtera silaturahmi ke kediaman Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.



Antara lain Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri bersama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS H. Ahmad Heryawan Presiden PKS H. Achmad Syaikh Sekjend DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy Bendahara Umum DPP PKS H. Mahfudz Abdurrahman silaturahmi ke kediaman Habib Rizieq Shihab di Petamburan Jakarta Pusat, Rabu (11/11).



Bukhori: Sudah Seharusnya HRS Berhak Pulang ke Tanah Air

“Sudah seharusnya HRS berhak dan bisa pulang ke tanah air sebagaimana warga negara Indonesia yang lain. Sebab, hingga hari ini tidak ada delik yang sah yang menyatakan beliau terbukti bersalah atas kasus hukum yang pernah dituduhkan padanya

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (06/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meminta Pemerintah menjamin keselamatan dan keamanan Habib Rizieq Shihab (HRS) setibanya di Indonesia.

Pasalnya menurut Bukhori, sejumlah perkara hukum yang sempat ditudingkan padanya sampai saat ini tidak terbukti kebenarannya.

“Sudah seharusnya HRS berhak dan bisa pulang ke tanah air sebagaimana warga negara Indonesia yang lain. Sebab, hingga hari ini tidak ada delik yang sah yang menyatakan beliau terbukti bersalah atas kasus hukum yang pernah dituduhkan padanya,” ungkap Bukhori di

Jakarta, Jumat (06/11)

Untuk diketahui, Imam Besar FPI ini pernah disorot karena tuduh tersangkut sejumlah kasus hukum, antara lain kasus chat mesum dan pelecehan terhadap Pancasila.

Anehnya, kasus hukum tersebut mencuat pasca aksi 212 pada 2016 dimana HRS yang merupakan salah satu motor penggerak aksi massa terbesar sepanjang era reformasi tersebut. Namun yang terbaru, kedua kasus tersebut telah dihentikan penyidikannya oleh Polri alias (SP3) karena dianggap tidak memiliki cukup bukti.

Anggota Komisi VIII ini menilai bahwa sederet perkara hukum yang pernah menyerjat

imam besar FPI ini seolah direkayasa oleh pihak yang tidak senang terhadap keberadaan dirinya dalam rangka membunuh karakter dan menjatuhkan martabatnya sebagai ulama yang dikenal kritis.

“Dengan mencermati sejumlah kasus hukum yang pernah ditudingkan padanya, saya justru memandang bahwa ada indikasi upaya kriminalisasi terhadap dirinya sehingga membuatnya terpaksa hijrah untuk sementara waktu ke Arab Saudi. Keputusan hijrah inilah yang saya pandang sebagai keputusan bijak untuk mengantisipasi benturan horizontal antara simpatisannya dengan aparat sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar,” terangnya.

Lebih lanjut, Anggota Baleg ini menyambut positif kepulangan ulama tersebut ke tanah air. Ia meyakini bahwa kegembiraan atas kabar kepulangannya tersebut tidak hanya dirasakan oleh dirinya, tetapi juga dirasakan oleh umat Islam di tanah air.

“Ahlan wa sahlana. Kita harus jaga baik-baik kehadiran para ulama demi kemaslahatan bangsa,” pungkasnya.



Terkait Rencana Kembalinya Habib Rizieq

Aleg PKS: Kita Menyambut Baik Kepulangannya

“Terkait segala kekhawatiran dan spekulasi ummat tentang apa yang akan terjadi pada dirinya setelah tiba di tanah air, kita minta Pemerintah hadir untuk melindungi dan tulus memastikan semuanya akan baik-baik saja sesuai apa yang selama ini dijanjikan”

H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (04/11) — Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab hari ini mengemukakan jadwal kepulangannya ke Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi menyambut baik kabar rencana kepulangan Habib Rizieq Syihab ke Tanah Air.

“Sebagai Warga Negara Indonesia, saya pikir Habib Rizieq punya hak yang mutlak untuk kembali ke Tanah Airnya dan berkumpul lagi bersama kita, ahlan wa sahlán, kita bahagia mendengar kabar itu.” ujar Nurhasan, Rabu (04/11).

Menurutnya, Habib Rizieq

adalah Tokoh Agama yang lurus, kharismatik dan sangat berpengaruh bagi masyarakat muslim Indonesia saat ini, sehingga sudah selayaknya kedatangannya disambut baik serta berhak mendapat hak perlindungan dari negara.

“Terkait segala kekhawatiran dan spekulasi ummat tentang apa yang akan terjadi pada dirinya setelah tiba di tanah air, kita minta Pemerintah hadir untuk melindungi dan tulus memastikan semuanya akan baik-baik saja sesuai apa yang selama ini dijanjikan”, lanjutnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI yang membicarakan masalah

sosial dan keagamaan ini, juga menegaskan bahwa perlindungan negara terhadap Tokoh Agama dan Simbol Agama saat ini menjadi salah satu prioritas pembahasan di DPR untuk dibuatkan aturan Perundang-undangannya.

“Undang-undang

Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama itu sangat penting dan mendesak untuk segera dituntaskan, karena Tokoh Agama sangat rentan posisinya, misalnya Amar Ma'ruf Nahi Munkar lawannya yaa kemunkaran, oleh karena itu wajar bila Indonesia sebagai negara Pancasila wajib menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan melindungi Tokoh Agamanya”, tegasnya.

“Alhamdulillah, RUU PTASA yang diinisiasi oleh PKS bersama beberapa fraksi lainnya sudah masuk dalam Prolegnas dan sedang disiapkan Naskah Akademik serta draft awalnya. Mohon do'anya semoga semuanya lancar agar tidak ada lagi cerita persekusi ataupun kriminalisasi di negeri ini”, pungkasnya.





PKS Dukung Habib Rizieq Balik ke Indonesia:

Mardani ; Kita Bangun Indonesia Bersama

Kepada semua pihak, ayo kita nikmati demokrasi dengan kontestasi karya dan gagasan dan politik untuk rakyat. Jangan gaduh kecuali untuk kepentingan rakyat.

Dr. H. MARDANI, M.Eng

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta - Habib Rizieq Syihab (HRS) mengklaim akan tiba di Indonesia pada 10 November 2020. Elite PKS Mardani Ali Sera mendukung serta berharap kepulangan Rizieq dapat semakin membangun Indonesia.

"Pesan untuk Habib Rizieq, ahlanwasahlan, kita bangun Indonesia bersama. (Saya) dukung (kepulangan HRS)," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (4/11/2020).

Anggota Komisi II DPR RI ini menilai HRS punya hak kembali ke Indonesia. Menurutny, kepulangan HRS dapat menjaga kualitas demokrasi di Tanah Air.

"Pertama, hak Habib Rizieq balik ke Indonesia. Bagi beliau dan keluarganya dan

baik bagi demokrasi Indonesia. Karena kualitas demokrasi kita dapat teruji saat pihak yang kritis pada pemerintah dapat lancar beraktivitas," ujar Mardani.

Mardani meminta semua pihak tidak membuat kegaduhan kecuali untuk kepentingan rakyat. Ia pun mendoakan agar proses kepulangan Habib Rizieq berjalan lancar.

"Kepada semua pihak, ayo kita nikmati demokrasi dengan kontestasi karya dan gagasan dan politik untuk rakyat. Jangan gaduh kecuali untuk kepentingan rakyat," ujar Mardani.

Selain itu, Mardani merespons rencana pernikahan putri Habib Rizieq. Ia yakin

Habib Rizieq akan menggelar acara pernikahan anaknya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

"Saya yakin Habib Rizieq akan menggelar acara pernikahan dan yang lain dengan menjaga protokol pencegahan COVID-19. Kita semua harus memberi contoh perilaku sehat mencegah penularan COVID-19," sambungnya.

Diketahui, pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab mengumumkan rencana kepulangan dari Arab Saudi ke Indonesia. Rizieq akan terbang ke Jakarta pada pekan depan.

"Insyaallah saya dan keluarga, insyaallah hari Senin tanggal 9 November 2020



pukul 19.30 waktu Saudi, akan terbang dari bandara Kota Jeddah dengan pesawat Saudia," kata Rizieq di akun YouTube Front TV, Rabu (4/11).

Habib Rizieq juga berencana menikahkan putri keempatnya setiba di Tanah Air nanti. Ia akan menikahkan putrinya bersamaan dengan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad di markas FPI, Petamburan.

"Insyaallah pada hari Sabtu, tanggal 14 November,

tahun 2020 malam, bakda salat Isya, kita akan langsung bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam untuk menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di markas besar Front Pembela Islam di Petamburan, Jakarta Pusat, sekaligus insyaallah saya akan menikahkan putri saya yang keempat, yaitu Syarifah Najwa Syihab, dengan tunangannya, insyaallah, Sayid Irfan Alaidrus," ujar Habib Rizieq.

Legislator PKS: Negara Harus Lindungi Kepulangan Habib Rizieq Shihab

Pemerintah harus tetap mengakui ketokohan beliau. Artinya kan punya kelebihan, punya nilai yang harus diperhatikan oleh negara

DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, MH

Anggota Komisi III DPR RI

KARTA – Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dimiyati Natakusumah menyambut baik terkait rencana kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke tanah air. Menurutnya, negara harus melindungi kepulangan Rizieq Shihab.

"Dalam pembukaan (UUD) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Karena Habib Rizieq ini masih warga negara Indonesia, oleh sebab itu harus dilindungi dan harus betul-betul dijaga," kata Dimiyati kepada Republika, Kamis (5/11).

Apalagi, dia menambahkan, Rizieq merupakan bukan orang yang sembarangan. Ia

pun menyanjung kelebihan yang dimiliki Rizieq Shihab sehingga sampai saat ini masih memiliki pengikut yang cukup banyak.

"Pemerintah harus tetap mengakui ketokohan beliau. Artinya kan punya kelebihan, punya nilai yang harus diperhatikan oleh negara," ungkapnya.

Dia juga berharap, agar kepolisian menjamin keamanan, dan keselamatan Rizieq Shihab. Terkait adanya dugaan delik pidana yang dilakukan Rizieq, ia meminta, agar polisi bersifat objektif.

"Tapi, saya kira sekelas Habib Rizieq tidak mungkin lah, rasanya tidak mungkin gitu. Beliau kan sufi ilmu pengetahuannya tinggi,

pengikutnya tinggi, pengetahuan agamanya tinggi, apalagi seorang habib rasanya nggak mungkin melakukan kriminal," tuturnya.

Sebelumnya, Pendiri Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab memastikan akan mendarat di Indonesia pada 10 November 2020 mendatang. Habib Rizieq dan keluarga akan langsung kembali ke kediamannya di Petamburan, Jakarta Barat setelah tiba di Jakarta.

"Hari Senin tanggal 9 November, Insya Allah saya dan keluarga akan terbang dari Bandara Jeddah pukul 19.30 waktu Saudia, dengan pesawat Saudia Airlines nomor penerbangan SP 816," ujar Habib Rizieq melalui live streaming, Rabu (4/11).

"Insya Allah, Pesawat kami akan tiba di Cengkareng pada 10 November di Terminal III pada pukul 09.00 waktu Jakarta," imbuhnya.





Hanya Karena Video 'Ahlan Wa Sahlan'

PKS Pertanyakan Penahanan Serka BDS

Bisa saja publik menilai bahwa menghukum prajurit itu sama artinya memposisikan Habib sebagai musuh negara. Kepada Panglima TNI, saya ingin tanya, poin nomor berapa dari sapta marga yang dilanggar oleh prajurit TNI ini?"

H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil mempertanyakan penahanan seorang prajurit TNI berinisial Serka BDS karena video ucapan selamat datang kepada Habib Rizieq Shihab.

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini tidak habis pikir dengan keputusan tim penyidik polisi militer yang memperkarakan prajurit TNI tersebut hingga harus mengenakan baju tahanan.

"Apa yang salah dari prajurit TNI itu? Melanggar hukum kah dia menyampaikan hal itu? Apa hanya karena dia memakai baju dinas TNI, lalu dia dihukum?" kata Nasir Djamil seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOlid, Rabu (11/11).

"Mau di bawa kemana

negeri ini kalau prajurit TNI diborgol seperti pelaku kriminal hanya karena dia menyampaikan pesan soal keputrahan Habib Rizieq? Apakah ucapannya itu melanggar sapta marga prajurit?" tegas Nasir.

Atas kejadian itu, Nasir Djamil meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan terkait dengan perkara yang menimpa Serka BDS.

"Dengan segala kerendahan hati, saya meminta kepada Presiden Jokowi selaku atasan Panglima tertinggi TNI agar memaafkan dan membebaskannya dari hukuman," katanya.

Legislator asal Aceh ini khawatir dengan dijebloskan ke penjara, justru akan memunculkan polemik di kalangan masyarakat dan seakan menganggap

Habib Rizieq sebagai musuh negara.

"Bisa saja publik menilai bahwa menghukum prajurit itu sama artinya memposisikan Habib sebagai musuh negara. Kepada Panglima TNI, saya ingin tanya, poin nomor berapa dari sapta marga yang dilanggar oleh prajurit TNI ini?" tanyanya menegaskan.

"Prajurit itu lahir dari rahim rakyat. Pertanyaannya, apakah Habib Rizieq bukan bagian dari rakyat Indonesia?" tutupnya.

Sementara secara terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau), Marsesal Pertama Fajar Adriyanto mengamini ada proses hukum yang diberlakukan kepada Serka BDS.

Ia mengatakan, Serka BDS terbukti melanggar hukum disiplin militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a UU 25/2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

"Itu betul, memang personel yang bertugas di salah satu satuan TNI AU di Halim Perdanakusuma jelas melanggar hukum disiplin militer. Sekarang yang bersangkutan ditahan untuk diselidiki dan didalam oleh POM AU dan intelijen," kata Fajar kepada Kantor Berita Politik RMOlid. [dzk]



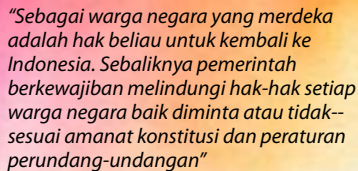
A close-up portrait of Nurhasan Zaidi, a man with a beard and glasses, smiling. He is wearing a white headband. The background is a soft, out-of-focus orange and yellow gradient.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

The logo of the Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) is located in the top right corner. It features a circular emblem with a bird (Garuda) and the text "FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA" around it. Below the emblem is the PKS logo, which consists of a stylized "PKS" and the text "PARTAI KEADILAN SEJAHTERA".

"Terkait segala kekhawatiran dan spekulasi ummat tentang apa yang akan terjadi pada dirinya setelah tiba di tanah air, kita minta Pemerintah hadir untuk melindungi dan tulus memastikan semuanya akan baik-baik saja sesuai apa yang selama ini dijanjikan"

NURHASAN ZAIDI



"Sudah seharusnya HRS berhak dan bisa pulang ke tanah air sebagaimana warga negara Indonesia yang lain. Sebab, hingga hari ini tidak ada delik yang sah yang menyatakan beliau terbukti bersalah atas kasus hukum yang pernah dituduhkan padanya.



"Dalam pembukaan (UUD) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Karena Habib Rizieq ini masih warga negara Indonesia, oleh sebab itu harus dilindungi dan harus betul-betul dijaaga."



"Terkait segala kekhawatiran dan spekulasi ummat tentang apa yang akan terjadi pada dirinya setelah tiba di tanah air, kita minta Pemerintah hadir untuk melindungi dan tulus memastikan semuanya akan baik-baik saja sesuai apa yang selama ini dijanjikan"



"Ahlanwasahlan, kita bangun Indonesia bersama. Kepada semua pihak, ayo kita nikmati demokrasi dengan kontestasi karya dan gagasan dan politik untuk rakyat. Jangan gaduh kecuali untuk kepentingan rakyat"

fraksi.pks.id Fraksi PKS DPR RI fraksipksdpri @fpkspdprri PKS TV DPR RI

Joe Biden terpilih sebagai Presiden

Wakil Ketua Komisi 1 FPKS Ucapkan Selamat pada Rakyat Amerika

“Selamat kepada seluruh Warga Amerika Serikat yang telah menyuguhkan pesta demokrasi yang akuntabel, transparan dan fair sejauh ini bagi seluruh warga dunia. Dan selamat mendapatkan Presiden baru Bapak Joe Biden, semoga membawa kebaikan bagi semua”

Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Solo (08/11) — Pidato kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden Amerika Serikat beberapa jam yang lalu membawa angin segar bagi dunia karena menyerukan persatuan bagi Rakyat Amerika dan juga berimplikasi bagi dunia dan juga Indonesia.

“Joe Biden menyerukan persatuan dan meminta para pendukungnya untuk ‘stop memperlakukan lawan kita sebagai musuh,’ meski itu

diserukan untuk warga Amerika saya berharap juga untuk warga dunia agar kedamaian diseluruh kawasan yang selama Trump memimpin AS, dunia penuh dengan ketegangan dan gesekan” Jelas Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasryhari kepada media, Ahad (08/11).

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini mengucapkan selamat kepada Warga Amerika Serikat yang menyuguhkan demokrasi

dan proses pemilu yang dapat dikatakan lebih baik dari tanah air karena perhitungan yang cepat dan terbuka.

“Selamat kepada seluruh Warga Amerika Serikat yang telah menyuguhkan pesta demokrasi yang akuntabel, transparan dan fair sejauh ini bagi seluruh warga dunia. Dan selamat mendapatkan Presiden baru Bapak Joe Biden, semoga membawa kebaikan bagi semua” ujar Kharis.

Menurut legislator asal Solo ini dalam politik luar negerinya, AS dibawah kepemimpinan Biden akan tetap menjadikan Indonesia tetap sebagai salah satu andalan AS di Asia Tenggara apalagi terkait dengan ketegangan di Laut Cina Selatan.

“Joe Biden akan mengan- dalkan sekutunya di Asia Tenggara dalam berbagai isu keamanan dan Indonesia menjadi negara yang dipandang penting sebagai negara terbesar di



ASEAN untuk membuat kawasan Asia Tenggara tetap kondusif, terutama berkaitan dengan isu Laut China Selatan” jelas Kharis.

Kharis juga menambahkan peluang ini bisa Indonesia memanfaatkan untuk menjalin kerja sama bilateral dengan AS di bidang pertahanan, seperti

persediaan senjata dan pelatihan militer bagi TNI.

“Semua bisa menguntungkan Indonesia tergantung dengan upaya diplomasi yang dijalankan Pemerintah Indonesia dalam mengikat kerjasama yang terbaik untuk tanah air Republik Indonesia” tutup Kharis.

Politikus PKS Serukan Joe Biden Koreksi Kebijakan AS yang Tak Adil bagi Palestina

"Joe Biden harus mengoreksi jalan kebijakan AS sebelumnya dibawah Trump yang tidak adil terhadap rakyat Palestina yang menjadikan AS sebagai mitra Israel dalam penindasan dan agresi

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (09/11) — Kandidat Partai Demokrat Joe Biden mengalahkan Presiden Donald Trump untuk menjadi presiden ke-46 Amerika Serikat (AS). Dengan demikian, Biden akan memimpin negara yang saat ini berada di pusaran pandemi Covid-19 dan gejala ekonomi dan sosial.

Anggota Komisi I DPR RI, Toriq Hidayat mengucapkan selamat kepada Biden yang telah menjadi presiden baru Amerika Serikat.

Menurutnya, dunia saat ini sedang menunggu sikap dan tindakan Biden dalam menangani problem dunia, termasuk dalam dunia Islam.

"Selamat Joe Biden menjadi presiden baru Amerika. Dunia menunggu sikap dan tindakan Anda dalam menangani problematika dunia yang ada, supaya jelas bagi kontribusi Presiden ke-46 AS bagi terciptanya keamanan dan ketentraman serta kedamaian dunia," ungkap Toriq.

Politikus Senayan asal PKS menilai terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat akan positif untuk kepentingan umat Islam. Karena, menurutnya, Biden adalah seorang yang menghormati agama.

"Untuk kepentingan umat Islam menurut saya bagus

karena Dia begitu menghormati agama-agama yang ada dan memperlakukannya dengan baik. Tentu saja hal ini bagi umat Islam disambut sebagai sesuatu yang menggembirakan," ujar Toriq.

Toriq sendiri tak meyakini seratus persen apakah Biden akan tetap konsisten dengan janji-janjinya yang berpihak terhadap umat Islam. Namun yang jelas sekarang Amerika Serikat segera memasuki lembaran baru dalam kehidupan pemerintahannya, yang dipimpin oleh seseorang yang lembut dan bagus adab juga etikanya.

"Tapi kita tentu juga belum bisa benar-benar percaya dan yakin. Untuk membuktikannya mari kita tunggu saja pelantikannya dan masa 100 hari dia memegang kekuasaannya," ucapnya

Toriq menilai kalau pemerintah sebelum Trump berfokus pada upaya menyejahterakan dunia agar sejahtera namun pada era Trump nilai tersebut



ditinggalkan dan lebih fokus untuk membangun AS dengan mengabaikan dunia, bahkan, berkonflik secara head to head dengan sejumlah negara.

"Kemudian dibawah naiknya Trump, banyak kebijakan yang membikin kaget masyarakat internasional, seperti bertemu dengan Kim Jong Un dari Korea Utara, keluar dari WHO, memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem dan mengakhiri secara pihak hasil perundingan Iran terkait pengembangan nuklir Iran", ungkapnya.

Tambahnya lagi, Trump kerap melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang telah dirancang oleh para biro-

krasinya. Perlawanan dilakukan melalui tweet dan juga langsung mengganti birokrat yang tidak sepemahaman dengan Trump.

"Bahkan pada pemerintahan Trump AS sumber inspirasi bagi elemen masyarakat di berbagai negara untuk membangkitkan ekstrim kanan dan supremasi kulit putih (white supremacist). Saya berharap Biden segera mengembalikan nilai-nilai untuk menghormati pluralisme, hak asasi manusia dan tidak merendahkan suatu bangsa dengan peradabannya", harapnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Terkait Penggunaan Algoritma Internet

Sukamta: Perlu Diatur dalam RUU PDP

“Demi keamanan serta kenyamanan masyarakat dan negara, data-data pribadi yang diambil dari proses penggunaan piranti cerdas ini termasuk data pribadi yang harus dilindungi. Karenanya, menurut saya ini relevan diatur lebih jelas dan tegas dalam RUU PDP untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan

H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (10/11) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta menanggapi sistem algoritma melalui viralnya film dokumenter berjudul ‘The Social Dilemma’.

Film tersebut berisi pandangan dari para mantan pegawai dan eksekutif perusahaan raksasa teknologi dan media sosial, seperti Facebook, Google, YouTube, Twitter, Instagram, hingga Pinterest.

Film itu juga menggambarkan betapa ‘seramnya’ teknologi internet dan media sosial karena semua data aktivitas

yang kita lakukan di internet diawasi, direkam, dan diukur oleh sistem algoritma yang telah dirancang sedemikian rupa untuk memantau-matai kehidupan manusia.

Lewat olah data ini, media sosial digambarkan menjadi alat untuk mempengaruhi perilaku kita. Polemik pun muncul hingga pihak Facebook melayangkan kritik terhadap film dokumenter tersebut.

Hal ini bertepatan dengan sedang dibahasnya Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) di DPR

yang sangat terkait dengan soal pengolahan data pribadi lewat algoritma.

“Saya menyoroti soal penggunaan algoritma di internet dengan konteks RUU PDP yang sedang kami bahas di Komisi I DPR bersama Pemerintah. Dengan penggunaan algoritma ini platform media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, youtube, line, dan seterusnya, bisa mengetahui pola suatu masyarakat sampai bisa mempengaruhi perilaku hidup mereka. Sehingga hal ini berpotensi menjadi masalah ketika digunakan untuk menginvasi privasi warga negara. Karenanya kita sangat perlu mengatur hal ini dalam RUU PDP,” ungkap Sukamta.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan misalnya ketika kita mengaktifkan lokasi, google merekam perilaku perjalanan kita, inilah yang dinamakan jejak digital. Lalu algoritma media sosial merekamnya dan menganalisisnya menjadi preferensi, kebiasaan dan bahkan pilihan-pilihan dari



urusan sederhana seperti soal selera makanan, belanja ekonomi, sampai ke hal-hal yang lebih kompleks seperti pandangan dan pilihan politik.

“Ini yang bisa kita sebut sebagai profiling. Perilaku kita bisa dibaca lewat ini, dan tentunya platform media sosial akan merekamnya perilaku kita dengan tawaran-tawaran konten tertentu berdasarkan hasil profiling tadi. Kita pastinya pernah mendapat cookies iklan atau konten yang serupa atau sejenis dengan konten yang pernah kita cari sebelumnya di internet. Ini contoh yang paling sederhana. Ini bisa berpotensi masuk dalam ranah intervensi yang mengganggu privasi jika tidak diatur secara memadai,”

papar Anggota Badan Anggaran Fraksi PKS DPR RI ini

Contoh yang lebih besar, Sukamta melanjutkan, misalnya, profiling tadi diperluas menjadi mengarahkan perilaku politik seperti kasus pencurian data pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica. Jika profiling diolah lagi, bisa menghasilkan data agregat. Ini bukan hanya soal kepentingan statistik biasa, tapi bisa mengarah kepada hal yang sangat strategis bagi kepentingan negara kita. Bukankah ini akan membahayakan keamanan pribadi dan bahkan bisa mengancam keamanan nasional ?

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Kematian Pendeta Yeremia Zanamani Harus Ditangani Serius

Saya meminta aparat penegak hukum untuk mengusut hingga tuntas kasus kematian pendeta Yeremia Zanamani. Pasalnya satu nyawa manusia sangat berharga dan keadilan harus tegak terhadap siapa pun dan di mana pun

DR. H. R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, MH

Anggota Komisi III DPR RI

Achmad Dimiyati Natakusumah meminta aparat penegak hukum menuntaskan kasus kematian pendeta Yeremia Zanamani, supaya kejadian serupa tidak terjadi.

Selain itu pendekatan humanis mesti dikedepankan dalam penanganan keamanan di Papua.

"Saya meminta aparat penegak hukum untuk mengusut hingga tuntas kasus kematian pendeta Yeremia Zanamani. Pasalnya satu nyawa manusia sangat berharga dan keadilan harus tegak terhadap siapa pun dan di mana pun," tegasnya kepada mediaindonesia.com, Rabu (4/11).

Menurut dia, modal dasar

yang kuat telah dimiliki kepolisian dari hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) pimpinan Benny Josua Mamoto, tim kemanusiaan untuk Intan Jaya yang dipimpin Haris Azhar dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM).

Ketiganya cukup untuk menjadi landasan kepolisian melakukan penyelidikan. Tentunya pengungkapan kasusnya, kata dia, tidak serta merta singkat dan menelan semua hasil investigasi itu. Kepolisian harus melakukan serangkaian penyelidikan, termasuk autopsi Yeremia.

"Jadi kita percayakan kepada kepolisian untuk

menangani kasus ini. Ini perlu autopsi juga supaya terang benderang kasusnya karena kan di tempat kejadian itu TNI tengah mencari sepucuk senjata yang dirampas oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata)," paparnya.

Ia menjelaskan siapapun nantinya yang dinyatakan pelaku pembunuhan ini harus mendapatkan sanksi hukum yang memberikan keadilan.

Termasuk, keadilan bagi keluarga korban. Mengenai saran peradilan seperti yang direkomendasikan tim investigasi KomnasHAM dan tim kemanusiaan untuk Intan Jaya, Dimiyati mengatakan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Lebih penting lagi, kasus ini perlu menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk mengubah pendekatan keamanan di Papua.

"Dengan adanya kasus ini pendekatan harus lebih humanis dilakukan kepolisian dalam penegakan hukum dan TNI dalam menjaga kedaulatan," pungkasnya.



Johan Dorong Asosiasi Pengusaha Hortikultura Komitmen Perhatikan Nasib Petani

Karena potensi kita sangat besar dan menjadi tanggung jawab kita Bersama untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri dan daya saing hortikultura di pasaran internasional”

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (11/11) — Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyampaikan pandangannya terkait permasalahan ekspor dan impor produk hortikultura dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi IV DPR RI Bersama Pengurus KADIN serta beberapa asosiasi pengusaha dan petani hortikultura, pada Rabu (11/11) di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Senayan Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Johan mendorong agar para pengusaha yang tergabung dalam berbagai asosiasi dapat berperan aktif serta mendukung agar Indonesia bisa menjadi juara produk hortikultura.

“Para pengusaha harus punya kepedulian dalam kegiatan bisnisnya, agar turut

berperan menjadikan Indonesia memiliki keunggulan dan daya saing hortikultura”, ujar Johan.

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini meminta para pengusaha agar tetap memperhatikan nasib petani dalam proses tata niaga hortikultura, karena Johan merasa sangat prihatin dengan kondisi petani di lapangan.

“Yang seringkali produk yang dihasilkan petani tidak bisa diserap oleh pasar dan di-hargai dengan harga yang murah yang menyebabkan nasib petani sangat memprihatinkan, padahal sektor Pertanian terus tumbuh positif namun tidak berdampak pada perbaikan nasib petani,” urai Johan.

“Saya berharap setiap pengusaha punya komitmen kuat untuk membantu petani

dan peduli dengan nasib petani saat ini,” cetus Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini juga menghimbau agar seluruh asosiasi pengusaha turut mendukung paradigma membangun kemandirian produksi dalam negeri, terutama produk hortikultura.

“Karena potensi kita sangat besar dan menjadi tanggung jawab kita Bersama untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri dan daya saing hortikultura di pasaran internasional”, urai Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini menandakan agar setiap pengusaha berkomitmen dengan kewajiban wajib tanam sesuai RIPH nya masing-masing dan dalam pelaksanaannya Johan mendukung berjalannya kebijakan ekspor impor yang transparan dan akuntabel dalam pengaturan dan penetapan RIPH untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dan pungutan liar.

“Harus ada komitmen Bersama antara pemerintah, pelaku usaha dan petani untuk memajukan produk hortikultura kita sebagai juara dan bisa memperbaiki kesejahteraan petani kita,” tutup Johan.



Andi Akmal Nilai Pemerintah Belum Sepenuhnya Perhatikan Sektor Pertanian

"Bagaimana pertanian kita bisa besar bila kebijakannya nangung seperti ini. Sementara Kementan kemarin cuma dapat tambahan Rp3 triliun pada saat bersamaan pemerintah menggelontorkan suntikan Rp 22 triliun sebagai modal untuk penyehatan PT Asuransi Jiwasraya. Ini bukti nyata Pemerintah belum sepenuhnya memberikan perhatian khusus terhadap sektor pertanian

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (10/11) -- Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin sangat menyayangkan keberpihakan pemerintah kepada sektor Pertanian masih dibawah harapan.

Segala ekpose yang menyatakan pentingnya sektor pertanian tidak didukung kebijakan yang menjadi bukti bahwa sektor pertanian mendapat dukungan penuh agar menjadi besar demi kemakmuran seluruh rakyat

Indonesia.

Yang dimaksud bukti dukungan pemerintah, menurut Akmal adalah kebijakan anggaran yang masih menganggap sebelah mata sektor pertanian ini.

Terbukti dengan eksekusi kebijakan tambahan anggaran sektor pertanian yang hanya 3 Triliun dibandingkan suntikan modal PT Asuransi Jiwasraya yang sebesar 22 triliun rupiah.

"Bagaimana pertanian kita

bisa besar bila kebijakannya nangung seperti ini. Sementara Kementan kemarin cuma dapat tambahan Rp3 triliun pada saat bersamaan pemerintah menggelontorkan suntikan Rp 22 triliun sebagai modal untuk penyehatan PT Asuransi Jiwasraya. Ini bukti nyata Pemerintah belum sepenuhnya memberikan perhatian khusus terhadap sektor pertanian", Jelas Akmal.

"Kalau memang Presiden melihat sektor pertanian sangat penting, harusnya politik anggaran dan keberpihakan itu betul-betul terlihat," kata politikus PKS ini menambahkan.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini tampak berlaku fair pada kinerja pemerintah bidang pertanian. Terlihat dalam berbagai kesempatan di forum kenegaraan, ia memuji usaha Kementan dalam menjaga pasokan logistik nasional selama masa pandemi.

Meski dinilai berkinerja baik, tetapi Akmal mengatakan masih ada sejumlah pekerjaan rumah bagi Syahrul. Pertama,



manajemen internal, yang menurutnya masih berjalan sendiri-sendiri. Dalam beberapa kesempatan, Akmal pun menilai kebijakan Kementan masih bersifat politis.

"Saya pikir, dia harus lebih memperkuat sinergitas antara eselon 1 dengan stakeholder yang ada," kata dia.

Kedua, terkait kepastian harga di tingkat petani. Akmal melihat, walau pemerintah sudah memberikan dana ke Perum Bulog untuk menjaga ketahanan pangan dan kepastian harga kepada petani,

tetapi terkadang harga komoditas, seperti cabai, bawang, dan jagung masih di bawah harga pembelian pemerintah saat panen raya.

Selama ini, tambah Akmal, produksi sektor pertanian melimpah dan banyak pada sentra-sentranya. Akan tetapi tidak ada yang membeli pada saat panen raya dalam serapan yang signifikan menghabiskan stok di petani.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



IKUTILAH

مسابقة قراءة الكتاب ففتح العين



LOMBA BACA KITAB KUNING^{IV} TINGKAT NASIONAL 2020

Persembahan
Fraksi PKS DPR RI
Dalam Rangka Peringatan
Hari Santri Nasional 2020
dan Peringatan 16 Tahun
Fraksi PKS DPR RI

KITAB YANG DIBACA

Kitab yang dibaca adalah Kitab
Fathul Mu'in Karya Syaikh
Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibary

SYARAT PESERTA

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Putra/Putri yang tercatat sebagai santri pesantren
3. Usia 17 - 25 tahun
4. Pendidikan minimal Madrasah Aliyahatau yang sederajat
5. Mendapat rekomendasi dari pimpinan pondok pesantren
6. Belum pernah menjadi juara 1 - 3 Lomba Kitab Kuning FPKS tingkat Nasional (2016-2018)



BERHADIAH UTAMA UMRAH

Raih Juaraanya Rebut Hadaiahnya

Juara 1	UMRAH	Juara Harapan 1	Rp 15.000.000,-
Juara 2	Rp 25.000.000,-	Juara Harapan 2	Rp 10.000.000,-
Juara 3	Rp 20.000.000,-	Juara Harapan 3	Rp 5.000.000,-

Setiap Peserta akan mendapat sertifikat yang ditanda tangani oleh
Ketua Majelis Syura, Presiden PKS dan Ketua Fraksi PKS DPR RI

AGENDA PELAKSANAAN

Masa Pendaftaran
22 Oktober - 15 November 2020

Babak Penyisihan di 34 Provinsi
Babak Penyisihan akan diselenggarakan antara 16 November 2020 hingga 13 Desember 2020 bertempat di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) di 34 Provinsi se Indonesia.

Babak Final
22 Desember 2020

DEWAN JURI

KH. Syuhada' Syarkun, S.Ag., M.HI.
(Pesantren Tebuireng-Jombang Jatim)
KH. DR. Muslih Abdul Karim, MA
(Ketua Umum MAPADI)
Dr. KH. Ali Akhmadi, MA, Al-Hafidz
(Ketua BPU-DPP PKS)

NARAHUBUNG

0856-4554-6397
Agus. A. Wahid MG, SPd, M.Sc.
0822-6062-1141
Susiaty Puspasari, B.Sc., M.Sc.
0813-2025-0848
Iman Sulaiman, Lc.
0813-8642-7673
Dr. Suesilowati



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA
Ketua Fraksi PKS DPR RI

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



H. Ahmad Syaikhul
Presiden PKS

Habib Dr. Salim Segaf Aljufri, MA
Ketua Majelis Syura PKS

Ekonomi Resesi, PKS Minta Pemerintah Empati dan Tunda Kenaikan Tarif Tol

kenaikan tarif tol di tengah resesi hanya akan menambah beban masyarakat. Sebab, meningkatnya tarif jalur bebas hambatan itu akan menyebabkan harga-harga barang kebutuhan pokok naik dan daya beli makin merosot

H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (06/11) — Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS, Suryadi JP, meminta Pemerintah menunda kenaikan tarif jalan tol setelah Indonesia resmi dinyatakan masuk jurang resesi.

Suryadi mengatakan pemerintah harus meningkatkan empatinya terhadap krisis yang tengah terjadi.

“Fraksi PKS mendesak agar pemerintah menunda kenaikan tarif tol sampai pertumbuhan ekonomi kembali naik dan stabil serta daya beli masyarakat pulih kembali,” tutur Suryadi dalam keterangannya, Kamis, 5

November 2020.

Suryadi menyebut, kenaikan tarif tol di tengah resesi hanya akan menambah beban masyarakat. Sebab, meningkatnya tarif jalur bebas hambatan itu akan menyebabkan harga-harga barang kebutuhan pokok naik dan daya beli makin merosot.

Dia pun meminta dalam pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, kriteria kenaikan tarif tol memperhatikan faktor ekonomi. Dengan begitu, alasan penyesuaian inflasi tidak lagi menjadi alasan utama bagi

kenaikan tarif.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan sejumlah tarif tol. Misalnya tarif untuk Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang), Jalan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) pada September. Baru-baru ini, pemerintah juga menaikkan tarif Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) I untuk Jalan Tol Akses Tanjung Priok (ATP) dan Jalan Tol Pondok-Aren-Ulujami.



Kontraksi Investasi Minus 6%

Politisi PKS: Tunjukkan Tingginya Inefisiensi Birokrasi

Penyebab ICOR tinggi karena banyak korupsi dan inefisiensi birokrasi dalam mengurus perizinan. Sebaliknya semakin rendah ICOR, itu berarti efisiensi investasi makin tinggi. Karena inefisiensi tadi maka, investasi yang masuk ke Indonesia hanya menghasilkan output yang sedikit

AMIN AK, M.M.

Anggota Komisi VI DPR RI

Surabaya (03/11) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak. menyatakan, Pemerintah harus mempercepat dan memperkuat reformasi birokrasi, terutama berkaitan dengan peizinan investasi.

Rendahnya nilai dan kualitas investasi yang masuk, hingga terjadi kontraksi minus 6 persen pada kuartal III 2020 akibat masih tingginya korupsi dan inefisiensi birokrasi, bukan akibat persoalan ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Amin saat menanggapi pertanyaan media terkait teguran Presiden Joko Widodo terhadap menteri yang bertanggung jawab di bidang investasi.

Kontraksi nilai investasi melebihi minus 5%, imbuhnya, bisa berdampak pada lambatnya pemulihan ekonomi nasional.

"Rendahnya kualitas investasi di Indonesia itu karena banyaknya korupsi dan birokrasi di dalam negeri yang berbelit,"

tegas Amin.

Buruknya kualitas investasi juga tergambar dari tingginya rasio penambahan modal terhadap pertumbuhan ekonomi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

"Rasio ini mencerminkan seberapa besar tambahan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB)," ungkap Amin.

Amin mengutarakan semakin tinggi nilai ICOR investasi semakin tidak efisien, terlalu banyak kepentingan di luar investasi yang mengganggu.

"Penyebab ICOR tinggi karena banyak korupsi dan inefisiensi birokrasi dalam mengurus perizinan. Sebaliknya semakin rendah ICOR, itu berarti efisiensi investasi makin tinggi. Karena inefisiensi tadi maka, investasi yang masuk ke Indonesia hanya menghasilkan output yang sedikit," tegasnya.

Nilai ICOR yang tinggi juga,



lanjutnya, membuat pihak asing enggan berinvestasi di Indonesia karena biaya investasi yang tinggi.

"Vietnam menjadi pilihan alternatif karena ICORnya lebih rendah dibanding Indonesia. Tahun 2019, ICOR Indonesia mencapai 6,77 lebih buruk dari tahun 2018 yaitu sebesar 6,44. Bandingkan dengan negara peer-nya seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam sedang mendekati kisaran angka ideal sebesar 3%," urainya.

"Investasi saat ini diperhadapkan pada tingginya biaya investasi hingga lemahnya daya saing kita untuk

penyerapan modal investasi maupun pengelolaan di tingkat output," imbuh Amin.

Praktik-praktik korupsi mengakibatkan beberapa dampak besar terjadi terhadap investor.

Amin menegaskan dampak tersebut antara lain dapat memunculkan persaingan tidak sehat, distribusi ekonomi yang tidak merata, tingginya biaya ekonomi, memunculkan ekonomi bayangan, menciptakan ketidakpastian hukum, dan tidak efisiennya alokasi sumber daya perusahaan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Pergantian Komisaris BUMN, Aleg FPKS : Khawatirkan Penempatan Para Relawan

QUOTE

**H. ROFIK
HANANTO,
S.E.**

Anggota Komisi VII DPR RI

Masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, dari mulai resesi, merugi hingga bangkrut. Hal tersebut menjadi catatan tersendiri, bahwa kita butuh orang-orang yang memenuhi qualified sangat tinggi untuk mengelola BUMN di Negeri ini

Pergantian Komisaris BUMN

Aleg FPKS : Khawatirkan Penempatan Para Relawan

“Masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, dari mulai resesi, merugi hingga bangkrut. Hal tersebut menjadi catatan tersendiri, bahwa kita butuh orang-orang yang memenuhi qualified sangat tinggi untuk mengelola BUMN di Negeri ini

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (06/11) – Anggota Komisi VII DPR RI, Rofik Hananto, menyampaikan kritik dan sarannya mengenai pergantian komisaris BUMN beberapa hari yang lalu.

Hal ini disampaikan Rofik pada acara PKS Legislatif Corner, Jakarta, Jumat (06/11/2020).

Rofik menyatakan bahwa jumlah BUMN saat ini sangat banyak, bahkan mencapai angka ribuan. Tetapi, permasalahan yang dihadapi juga semakin bertambah banyak dan belum terselesaikan dengan baik.

“Masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, dari

mulai resesi, merugi hingga bangkrut. Hal tersebut menjadi catatan tersendiri, bahwa kita butuh orang-orang yang memenuhi qualified sangat tinggi untuk mengelola BUMN di Negeri ini,” kata Rofik.

Rofik menyatakan, bahwa sangat banyaknya masalah yang dihadapi tersebut, ia berharap pemerintah dapat menghadirkan komisaris yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di Negeri ini. Dengan menghadirkan komisaris yang memenuhi kebutuhan serta dapat menghadapi tantangan yang begitu banyak seperti dengan memiliki pengalaman yang banyak, jam terbang yang

cukup, handal mengelola korporasi, sekaligus punya kompetensi dan keahlian.

“Komisaris merupakan strategi inti dari perusahaan agar terkonsentrasi dan sustainable. Sehingga dapat berjalan dan tumbuh dengan baik. Sangat dibutuhkan orang-orang yang bisa membantu kinerja perusahaan atau perseroan. Contohnya ahli strategi, marketing, punya keahlian dan punya pengalaman mengelola masalah keuangan, karena keuangan ini merupakan contoh bagian terpenting menyusun sebuah perencanaan yang baik, punya pengalaman dibidang garap perusahaan tersebut. Misalnya, perusahaan energi komisaris atau direktur-nya harus punya pengalaman yang mendukung perusahaan tersebut,” jelas Rofik.

Ia juga menegaskan bahwa, komisaris seharusnya orang yang punya banyak gagasan dan kaya akan pengalaman, dan harus memiliki kompetensi yang tinggi.

“Masalahnya, komisaris yang banyak menempati posisi-



posisi strategis saat ini dihadirkan orang-orang yang belum kita yakin betul, kompetensi mereka untuk menjadi komisaris, apalagi ada kesan bahwa yang menempati disitu karena salah satu bagian dari balas jasa atas perjuangan mereka sebagai relawan,” tambah Rofik.

Rofik juga menegaskan, bahwa rangkap jabatan disuatu kementerian dan perusahaan tertentu, bisa mengakibatkan tanggung jawab yang tidak sempurna dan kurang optimalnya fungsi-fungsi pengawasan dari komisaris tersebut.

Kemudian, berdasarkan regulasi yang ada, rangkap jabatan sebuah instansi tidak diperbolehkan sesuai dengan UU BUMN Pasal 33,

dikarenakan hal tersebut dikhawatirkan dapat menjadi konflik interest serta konflik kepentingan.

“Pertamina bisa menjadi contoh, karena tiba-tiba merugi karena lifting rendah, karena SOP kurang, tidak bisa mengambil keuntungan, karena ekspor, karena covid-19 dsb. Tapi dibalik itu kita bisa menganalisa bahwa pertamina membuat strategi yang kurang tepat, ketika mengambil alih atau membeli saham dari prancis yang jumlahnya cukup besar, dan sahamnya jatuh, dan diperkirakan rugi sampai 7,5 Triliun,” tegas Rofik.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Wakil Ketua FPKS: Pemerintah Perlu Segera Isi Anggota Dewan Energi Nasional

“DEN juga perlu menyiapkan konsepsi cadangan penyangga strategis energi nasional yang perlu dikembangkan dan diimplementasikan. Kedua masalah strategis ini akan jalan di tempat kalau tidak dipikirkan dengan cermat oleh DEN sebagai lembaga kebijakan energi.”

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (11/11) — Komisi VII DPR RI, sejak 10 hingga 12 November mulai melakukan fit and proper test kepada 16 calon anggota Dewan Energi Nasional (DEN) yang diusulkan Pemerintah.

Sebelumnya Pemerintah melalui surat No. R-40/Pres/09/2020 tertanggal 11 September 2020 mengajukan 16 nama calon anggota DEN untuk diseleksi dan dipilih oleh DPR RI.

Dari 16 nama calon nantinya akan dipilih 8 nama yang mewakili pemangku kepen-

tingan terkait pengembangan energi nasional yaitu kalangan industri, akademisi, konsumen, teknolog dan lingkungan hidup.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mendesak Pemerintah untuk segera memproses pengisian anggota Dewan Energi Nasional (DEN), yang sudah lebih dari satu tahun kosong.

“Jangan terlalu lama membiarkan DEN tanpa anggota karena akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga yang dipimpin langsung oleh Presiden ini”, ungkapnya.

Padahal, kata Mulyanto, saat ini kebijakan energi nasional harus terus dikaji dan dievaluasi.

Mulyanto menambahkan fungsi dan produk kebijakan DEN ini sangat penting. Misalnya, terkait dengan peningkatan kontribusi energi baru-terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional yang masih jauh di bawah target.

DEN juga perlu menyiapkan konsepsi cadangan penyangga strategis energi nasional yang perlu dikembangkan dan diimplementasikan. Kedua masalah strategis ini akan jalan di tempat kalau tidak dipikirkan dengan cermat oleh DEN sebagai lembaga kebijakan energi.

“Rencananya seleksi anggota DEN melalui fit and proper test dilaksanakan sesuai jadwal Komisi VII DPR RI tanggal 10-12 November 2020, sehingga tanggal 12 November sudah dapat diputuskan Komisi VII untuk kemudian diminta pengesahannya kepada Sidang Paripurna DPR RI minggu depan,” jelas Mulyanto.



DEN adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU. No. 30 tahun 2007 tentang Energi.

“Rencananya seleksi anggota DEN melalui fit and proper test dilaksanakan sesuai jadwal Komisi VII DPR RI tanggal 10-12 November 2020, sehingga tanggal 12 November sudah dapat diputuskan Komisi VII untuk kemudian diminta pengesahannya kepada Sidang Paripurna DPR RI minggu depan,” jelas Mulyanto.

DEN adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang

bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU. No. 30 tahun 2007 tentang Energi.

Lembaga ini dipimpin langsung oleh Presiden, dengan Ketua Harian Menteri ESDM dan anggota usur Pemerintah; Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menristek dan Menteri LHK. Ditambah 8 anggota dari unsur pemangku kepentingan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Bukhori Dukung Program bagi Terwujudnya PKH Graduasi Berkualitas

“Peran pendamping PKH sangat krusial untuk memastikan bantuan dari pemerintah bisa sampai kepada yang berhak. Mereka adalah ujung tombak program karena paling tahu wilayah dan siapa saja pihak yang membutuhkan

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (05/10) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, mendukung program Kemensos yang berorientasi pada pemberdayaan keluarga miskin sehingga menjadi keluarga mandiri dan berdaya.

Hal ini disampaikan Bukhori dalam sambutannya pada Acara Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas KPM PKH Potensial dan Koordinasi Teknis dan Peningkatan Kualitas SDM PKH Tahun 2020 di Kota Semarang, Rabu (04/11/2020).

Bukhori menyatakan, bahwa sejauh ini Kemensos

telah menyalurkan sejumlah program jaminan perlindungan sosial dengan sasaran masyarakat prasejahtera, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Secara filosofis, Bukhori menilai program pemberdayaan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH potensial melalui bimbingan teknis oleh Kemensos tidak bisa dianggap sebagai wujud pemberian bantuan teknis semata bagi keluarga miskin. Akan tetapi, tersimpan sebuah tujuan mulia, yakni untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga miskin

melalui peningkatan kapasitas.

Bukhori juga menjelaskan, dalam konsep zakat, bantuan yang diberikan kepada orang miskin melalui dana zakat sesungguhnya bukan untuk memelihara mereka. Namun, untuk memberdayakan mereka sehingga bisa menjadi orang yang berdaya dikemudian hari dan bisa memberi pertolongan kepada orang miskin yang lain.

“Keberlanjutan manfaat inilah yang semestinya menjadi tujuan strategis dari sejumlah program bansos oleh pemerintah. Maka perlu diakui, saya melihat nilai tersebut dalam program bimtek bagi KPM potensial oleh Kemensos pada kesempatan ini,” jelas Bukhori.

Selain memberikan apresiasi kepada pihak Kemensos sekaligus dukungan moril bagi peserta pelatihan, politisi PKS ini juga memberikan sejumlah bantuan produktif untuk usaha kepada KPM PKH potensial supaya mampu menjadi KPM Graduasi.

Acara bimtek tersebut dihadiri oleh 40 KPM potensial



yang memiliki berbagai jenis usaha dan terdapat 11 jenis usaha andalan mereka. KPM PKH Graduasi adalah KPM PKH yang sudah tidak lagi menerima bantuan dari Kemensos karena berhasil mandiri dan berdaya secara status sosial dan ekonomi.

Selain itu, Anggota Baleg Fraksi PKS ini juga menyoroti isu kesejahteraan bagi SDM PKH yang dinilai timpang bila dibandingkan dengan jumlah KPM PKH yang semakin bertambah.

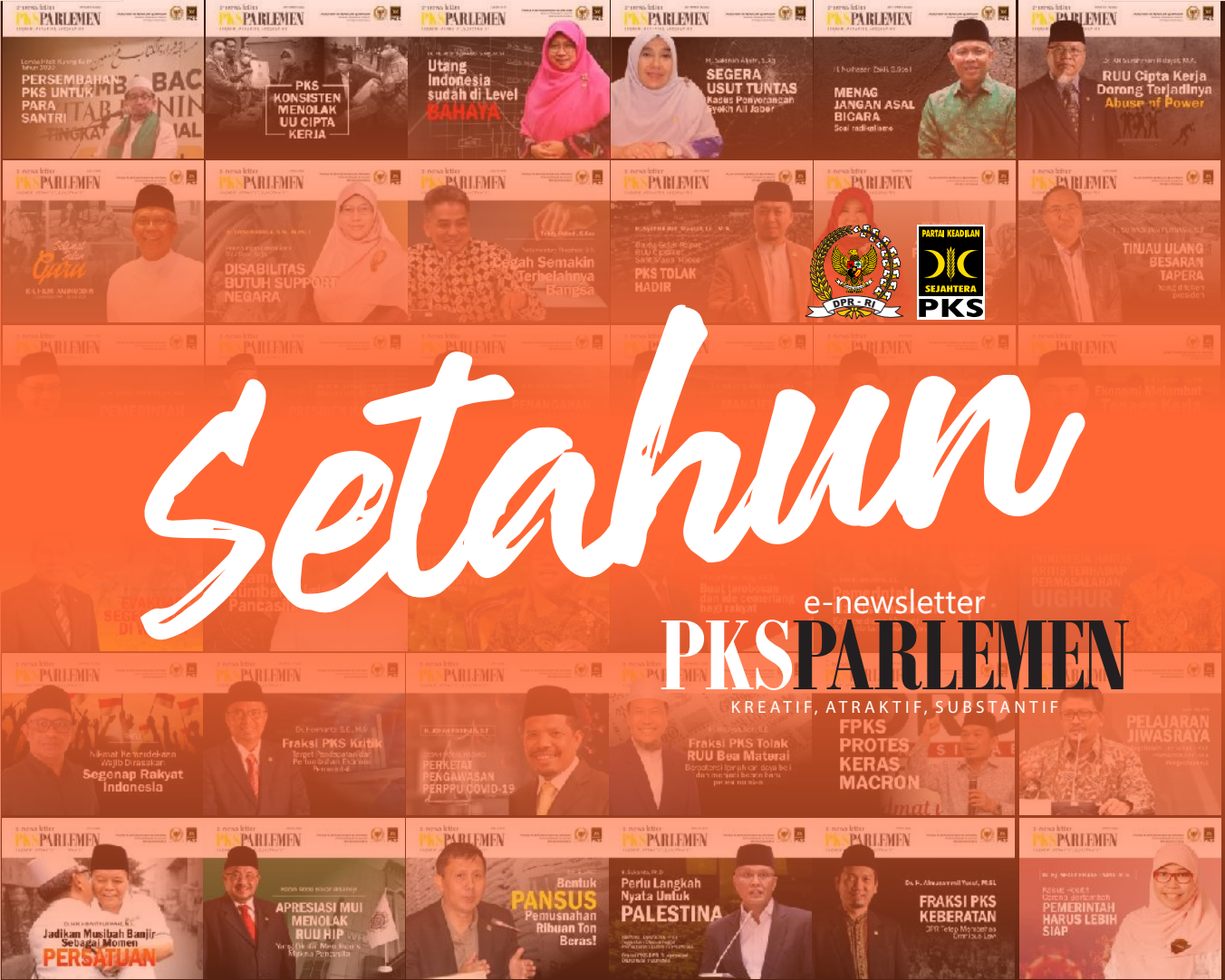
Pasalnya, keberhasilan para KPM PKH dalam mencapai peningkatan kualitas hidupnya tidak lepas dari peran dan

sumbangsih para pendamping program PKH.

“Jumlah KPM saat ini berkisar di angka 10 juta dan terus meningkat. Namun sangat disayangkan bahwa jumlah SDM PKH relatif tetap. Artinya, beban yang semakin bertambah tidak dibarengi oleh kompensasi yang sepadan,” ucap Bukhori.

Berangkat dari hal tersebut, legislator dari Jateng I ini berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan anggaran untuk kesejahteraan SDM PKH di parlemen.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Setahun

e-newsletter
PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Mengisi Masa Reses

Netty Ajak Masyarakat Konsumsi Pangan yang Aman

Setiap orang tua harus melindungi keluarganya dari paparan pangan berbahaya. Saat ini konsumsi pangan dan olahan pangan yang aman masih belum menjadi prioritas masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini penting dilakukan kepada masyarakat,

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Cirebon (04/11) — Pangan dan olahan pangan dari bahan berbahaya masih sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini mendapatkan perhatian dari Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani Aher.

Netty meminta agar keluarga menjadi benteng pertahanan dalam melindungi anggota keluarga dari paparan pangan berbahaya.

"Setiap orang tua harus melindungi keluarganya dari paparan pangan berbahaya. Saat ini konsumsi pangan dan olahan pangan yang aman

masih belum menjadi prioritas masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini penting dilakukan kepada masyarakat," ujar Netty dalam kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dengan tajuk 'Keamanan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru' pada Rabu (04/11/2020) di Kabupaten Cirebon.

Agenda yang diselenggarakan atas kerjasama Komisi IX DPR RI dan Badan POM RI yang digelar di Gedung PGRI dan Aula SD Al-Farabi Kab Cirebon ini menghadirkan berbagai kelompok masyarakat dari

berbagai usia dan pekerjaan.

"Sinergi dalam program edukasi ini harus gencar dilakukan dalam berbagai media dan metode agar masyarakat semakin paham dan terlindungi baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha. Kita masih mudah menemukan jajanan anak-anak kita yang tidak aman baik di sekolah maupun lingkungan rumah," jelas Netty.

Sementara itu Chairun Nisa, perwakilan BPOM RI turut menjelaskan peran dan kewajiban pihaknya dalam pengawasan obat dan makanan.

"Kebijakan tentang standar dan prosedur pengawasan obat dan makanan baik pengawasan sebelum dan selama edar yang dilakukan oleh pemerintah harus didukung oleh masyarakat, industri dan juga dunia usaha" katanya.

"Menjadi konsumen yang cerdas dan kritis itu penting agar kita tidak terjebak dan menyebarkan informasi yang salah serta menyesatkan terkait pangan" kata Didik Joko Pursito yang juga dari BPOM RI.

Pada masa Covid-19



seperti ini, kata Netty sudah seharusnya masyarakat menjaga daya tahan tubuh secara lebih maksimal.

"Jaga imun, aman dan iman di masa Covid-19 ini. Konsumsi terus pangan yang aman, jaga spiritualitas, serta lakukan terus protokol kesehatan. DPR saat ini sedang membahas Rancangan undang-undang POM sebagai upaya untuk memperkuat kinerja Badan POM dalam menjamin dan melindungi masyarakat" katanya.

Mengonsumsi pangan yang aman dan tinggi gizi sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh manusia. Bahkan menurut Profesor Christopher Murray dari

University of Washington, menu makanan menjadi salah satu pendorong kesehatan yang dominan di sel'Saya mengajak bapak ibu yang hadir di kegiatan ini untuk melakukan dua hal. Pertama, jadilah agen dengan menyebarkan informasi yang didapat pada hari ini tentang pangan yang aman dan cara mengeceknya kepada komunitas dan kelompok masyarakat lainnya. Kedua, masyarakat harus membantu pemerintah melakukan pengawasan terhadap pangan, pangan olahan dan obat yang beredar di sekitar kita agar kita bisa dapat mewujudkan Indonesia yang sehat, kuat dan kaya" tandas Netty.

Digitalisasi Sekolah Triliunan Dinilai Belum Matang

Fikri: Pemerintah Harus Selesaikan PR

Bantuan laptop hanya akan menjadi barang pajangan mewah di sekolah, tanpa adanya sinyal internet sebagai akses pendukung utama. Alat-alatnya diadakan, tapi buat apa bila tidak bisa akses informasi dan update bahan pelajaran

Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Jakarta (09/11) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih mengkritisi program digitalisasi sekolah pada 2021 yang menelan anggaran hingga Rp. 3 triliun, yang masih belum matang dari sisi perencanaan, sehingga terkesan terburu-buru.

“Wilayah 3T belum tercover penuh jaringan internet, sedangkan SDM guru kita juga masih belum siap, harusnya selesaikan PR ini dulu,” katanya di DPR Senayan, Senin (09/11).

Niat pemerintah untuk digitalisasi sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui pengadaan laptop, proyektor, dan perangkat teknologi informasi (TIK) dinilai kurang tepat sasaran.

“Sarana pendukung digital itu wajib ada akses internet,

sedangkan data pemerintah sendiri menunjukkan wilayah 3T masih sulit dijangkau sinyal,” kata politisi PKS ini.

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Pemerintah masih belum optimal menyediakan akses internet hingga 100% di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Baru setengah dari total desa di wilayah 3T yang terjangkau jaringan 4G,” ujar Fikri.

Dia merujuk Data Kominfo 2020, bahwa infrastruktur 4G yang telah dibangun telah mencapai 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Dari 20.341 desa di wilayah 3T, masih ada 9.113 desa lainnya yang belum terselimuti jaringan 4G.

Menurut Fikri, bantuan

laptop hanya akan menjadi barang pajangan mewah di sekolah, tanpa adanya sinyal internet sebagai akses pendukung utama.

“Alat-alatnya diadakan, tapi buat apa bila tidak bisa akses informasi dan update bahan pelajaran,” kritiknya.

Selain itu, Fikri menyinggung soal kesiapan sumber daya manusia terutama guru dan tenaga kependidikan dalam program digitalisasi ini.

“Surveynya kan 60 persen guru masih gagap teknologi informasi, perkembangan sekarang kita belum tahu, apakah masih sama atau ada perkembangan,” urainya.

Fikri menunjuk hasil survey Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) Kemendikbud pada akhir 2018 lalu.

Survey itu menyebut dari total guru yang ada di Indonesia, baru 40 persen yang melek dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Selebihnya, masih 60 persen guru masih gagap dengan kemajuan di era digital ini.

Fikri meminta peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama guru dan tenaga kependidikan menjadi prioritas



pemerintah terlebih dahulu.

“Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kreatifitas dan kualitas pendidik benar-benar diuji untuk menjamin kegiatan belajar mengajar tetap kondusif secara virtual,” imbuhnya.

Setiap program Pendidikan nasional, lanjut Fikri semesteriya juga memperhatikan kondisi kelokalan yang menjadi

sasaran.

“Mas Mentri ini nampaknya kurang dapat support data yg cukup. Sebaliknya walaupun Think globally, tapi harus tetep Act Locally sesuai data lapangan yang bahkan sudah tersedia dan telah dirilis oleh Kemendikbud sendiri,” pungkasnya.

Ledia Ajak Pelaku Ekonomi Kreatif Ubah Tantangan Pandemi Jadi Peluang

“Kalau pelaku UMKM masih mengandalkan cara-cara konvensional sementara zaman sudah memasuki era digital, bisa jadi usaha dari para pelaku UMKM ini akan sulit berkembang dan bertahan lama. Karena itu maka kita perlu melakukan penguatan pada keunikan produk dan pemanfaatan Media Digital dalam pengelolaan usaha

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Bandung (05/11) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa mendorong para pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengubah tantangan pandemi saat ini menjadi peluang untuk mencipta dan mengembangkan usaha.

“Delapan bulan berlalu dalam kondisi pandemi covid-19 selain memberi dampak pada persoalan kesehatan masyarakat juga telah menggoncang-

kan situasi ekonomi. Pemasukan berkurang, pengeluaran bertambah, penjualan menurun dan banyak lagi. Tetapi pada akhirnya kita tidak bisa berdiam diri dan menyesali nasib. Kita harus bangkit untuk melanjutkan hidup. Mengganti hambatan menjadi peluang.” Ujar Ledia menyemangati para peserta Bimbingan Teknis Strategi Branding dan Promosi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Melalui Media Digital di Era

Adaptasi Kebiasaan Baru

Dalam acara yang diselenggarakan bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di Bandung (03-05/11) ini, Ledia menuturkan, memanfaatkan peluang sudah nampak dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro dan menengah di masa pandemi tetapi masih perlu ditata dan ditingkatkan lagi agar lebih berkembang dan bisa bertahan lama.

“Kalau pelaku UMKM masih mengandalkan cara-cara konvensional sementara zaman sudah memasuki era digital, bisa jadi usaha dari para pelaku UMKM ini akan sulit berkembang dan bertahan lama. Karena itu maka kita perlu melakukan penguatan pada keunikan produk dan pemanfaatan Media Digital dalam pengelolaan usaha.” paparnya.

Aleg Fraksi PKS ini kemudian mencontohkan dalam paparannya foto-foto kuliner khas Bandung, Colenak, yang banyak beredar di beberapa sosial media. Dari foto tampilan



yang sederhana hingga dengan bentuk produk, kemasan, dan uraian yang lebih menarik.

“Semua ini produknya sama-sama colenak, tapi dengan penataan berbeda ternyata menghasilkan ketertarikan hingga keputusan pembelian yang berbeda dari para calon konsumen. Penataan yang lebih baik, menarik dan dipromosikan secara baik dan intens di jejaring media sosial ternyata mendorong pembelian dan perkembangan usaha,” urai Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini

Bimbingan teknis yang dilakukan bersama Kementerian Parekrif ini selain memberikan ilmu dari para ahli digital branding juga memberikan kesempatan para peserta untuk langsung berinteraksi dengan pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, baik

untuk bertanya, memberikan masukan maupun mengajukan berbagai curhatan untuk ditindaklanjuti.

“Perjlanan berusaha dan pengurusan sertifikat halal bagi para pelaku usaha mikro dan menengah kini semakin mudah. Akses jejaring untuk melakukan promosi, pemasaran hingga bantuan permodalan juga semakin transparan. Saya yakin, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung siap melakukan pendampingan bagi para pelaku UMKM untuk mendorong perekonomian masyarakat terutama di Kota Bandung semakin tumbuh dan berkembang dengan baik. Sementara apa yang merupakan ranah kami terkait kebijakan di tingkat pusat akan kami sampaikan dan dorong pada pihak-pihak terkait.” Tutup Ledia.

Buka Bimtek Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sakinah Imbau Pelaku Usaha Terapkan Protokol Kesehatan

“Kita perkenalkan apa yang ada di Sulawesi Tengah ini kepada masyarakat luas, agar mereka mengetahui destinasi pariwisata yang indah tidak hanya ada di Bali, Jawa, Sumatera, Kalimantan tapi ada kami di Sulawsi Tengah

Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Komisi X DPR RI

Palu (04/11) — Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor yang paling terdampak adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Komisi X DPR RI menggelar Bimbingan Teknis penyelenggaraan kegiatan dan penerapan CHSE pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Hotel Santika Palu, Selasa (03/11/2020).

Secara simbolik acara dibuka oleh Anggota DPR RI Komisi X Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, turut hadir dalam

kegiatan ini Heri Hermawan, Widyaiswara Ahli Madya Kemenparekraf, Trio Dewangga Subkoordinator pengelolaan penyelenggara kegiatan (event) khusus dan I Nyoman Sriadijaya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah serta para pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata di Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya Sakinah berharap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah dapat terus tumbuh dan berkembang dengan pesat.

“Kita menginginkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terus tumbuh dan berkembang, semakin menggeliat di tengah

pandemi Covid-19,” tutur Sakinah.

Sakinah menyebut keindahan destinasi pariwisata yang ada di Sulawesi Tengah tidak kalah indahnya dengan provinsi lain.

“Wonderful Sulawesi Tengah tidak kalah dengan provinsi lain, keindahan teluk Sulawesi Tengah sangat luar biasa. Masih banyak potensi pariwisata di Sulawesi Tengah yang perlu dikembangkan,” ungkapnya.

Politisi PKS itu menambahkan bahwa kewajiban sebagai masyarakat Sulawesi Tengah adalah memperkenalkan keindahan Sulawesi Tengah kepada masyarakat luas.

“Kita perkenalkan apa yang ada di Sulawesi Tengah ini kepada masyarakat luas, agar mereka mengetahui destinasi pariwisata yang indah tidak hanya ada di Bali, Jawa, Sumatera, Kalimantan tapi ada kami di Sulawsi Tengah,” tuturnya.

Selain destinasi wisata alam yang indah, Sulawesi Tengah juga meympan



kekayaan kuliner yang tidak diragukan enaknya.

“Kuliner di Sulawesi Tengah tidak diragukan enaknya, makanan tradisional Sulawesi Tengah mempunyai ciri khas tersendiri,” ucapnya.

Disela-sela Bimtek, Sakinah menyebut hal yang harus diterapkan para pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif menerapkan protokol kesehatan.

“Yang harus diterapkan oleh para pelaku wisata dan ekonomi kreatif adalah penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability). Selain itu yang harus diperhatikan juga penerapan 3M; memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan,” pungkas Sakinah.

Anis: Tidak Relevan Kaitkan Utang Warisan dengan Utang Pemerintah Sekarang

Apa yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani mengenai utang warisan itu memang merupakan fakta sejarah. Namun dari sejarah juga, kita mengetahui bahwa Presiden Soekarno memutuskan untuk mengabaikan pembayaran utang warisan Belanda tersebut pada tahun 1956, dan saat itu Indonesia sudah melunasi sebagian utang tersebut hingga 82 persen

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (03/11) — Pada pembukaan Ekspo Profesi Keuangan secara virtual, Senin (12/10/2020), Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan perjalanan panjang pemerintah Indonesia dalam membangun neraca keuangan negara yang sehat.

Awalnya, ada warisan utang dari masa penjajahan Belanda US\$1,13 miliar atau setara Rp19,14 triliun dengan

kurs saat ini.

Menkeu mengatakan catatan itu menunjukkan Belanda tidak hanya mewariskan perekonomian yang rusak, melainkan juga beban utang kepada Indonesia. Pernyataan senada disampaikan Kembali saat peringatan Hari Oeang RI ke-74 pada Sabtu (31/10/2020).

Politisi senior PKS, Anis Byarwati, menyampaikan

catatan tersendiri terkait dengan pernyataan Menkeu tersebut (3/11/2020).

Menurut Anis, apa yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani mengenai utang warisan itu memang merupakan fakta sejarah.

"Namun dari sejarah juga, kita mengetahui bahwa Presiden Soekarno memutuskan untuk mengabaikan pembayaran utang warisan Belanda tersebut pada tahun 1956, dan saat itu Indonesia sudah melunasi sebagian utang tersebut hingga 82 persen," tutur Anis.

Namun, Anggota Komisi XI DPR RI ini memberikan penekanan bahwa mengaitkan utang Indonesia di masa sekarang dengan utang warisan itu, "Saya kira tidak relevan," tegas Anis.

Dari masa ke masa, pemerintahan Indonesia memang memiliki utang.

"Yang harus kita lihat, utang itu dialokasikan untuk apa saja, dan seberapa besar dirasakan manfaatnya untuk



kesejahteraan rakyat," kata Anis.

Doktor ekonomi Islam lulusan Universitas Airlangga ini kemudian mengulas dari sisi lain. "Sekarang, kita lihat secara obyektif saja," tuturnya.

"Berdasarkan data APBN edisi Agustus 2020, realisasi pembiayaan utang Indonesia hingga Juli telah mencapai Rp519,22 triliun. Realisasinya terdiri dari penyerapan SBN Rp513,4 triliun, utang luar negeri (ULN) Rp5,17 triliun, dan pinjaman dalam negeri

Rp634,9 miliar. Angka dalam separuh tahun ini telah melebihi total utang selama tiga tahun sebelumnya," jelas Anis.

Anis menjelaskan, dengan realisasi ini posisi utang Indonesia per Juli 2020 telah menyentuh Rp5.434,86 triliun. Utang tersebut terdiri dari SBN Rp4.596,6 triliun, pinjaman Rp10,53 triliun, dan ULN Rp828,07 triliun.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Joe Biden Menang Pemilu AS

Aleg PKS: Resesi Indonesia Tetap Berlanjut ?

"Jika pemerintah tidak memperbaiki kinerjanya dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maka kuartal IV/2020 juga akan kembali mengalami pertumbuhan negatif. Dan Indonesia bisa kehilangan momentum perbaikan ekonomi di tahun 2021.

H. ECKY AWAL MUCHARAM

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (09/11) — Joe Biden diproyeksikan sebagai pemenang pemilu AS, Sabtu (7/11) siang waktu Amerika Serikat. Meski belum final karena masih ada upaya perlawanan Trump sebagai incumbent, kemenangan Biden diyakini banyak pihak memberikan harapan perbaikan dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Amerika Serikat.

Terpilihnya Biden ini secara otomatis diprediksi juga akan memengaruhi hubungan ekonomi AS dengan China yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap iklim ekonomi global.

Namun demikian, Ecky Awal Mucharam Anggota DPR RI

Komisi XI dari Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah agar lebih serius dalam menangani Covid-19 yang menjadi penyebab terjadinya resesi. Ditengah harapan publik AS dan dunia, saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih kontraksi akibat dampak Covid 19.

Sebagaimana diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan kuartal III/2020 _YoY_ Indonesia minus 3,49 persen.

Dari Gedung Nusantara I DPR RI, Ecky menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2020 negatif (-) 3,49 persen menjadi bukti bahwa penanganan Covid-19 oleh pemerintah belum serius dan belum efektif.

"Pemerintah juga belum mampu mendorong publik untuk patuh pada protokol Covid-19. Di sisi lain, program PEN juga belum menunjukkan hasil yang optimal," ungkap Ecky.

Ecky juga mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak memperbaiki kinerjanya dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maka kuartal IV/2020 juga akan kembali mengalami pertumbuhan negatif. Dan Indonesia bisa kehilangan momentum perbaikan ekonomi di tahun 2021.

Legislator PKS ini juga menegaskan jangan pernah Pemerintah berfikir bahwa solusi pamungkas penanganan Covid-19 adalah hanya vaksinasi masal. Sampai dengan saat ini belum ada vaksin Covid-19 yang lolos uji dan direkomendasikan WHO. Selain itu, perlu waktu yang lama sampai berbulan-bulan dalam melakukan proses vaksinasinya.

"Saat ini Kita harus belajar pada tetangga kita Singapura, Malaysia, Korea Selatan dan Jepang yang berhasil menekan laju penyebaran Covid-19," kata Ecky.

"Kemudian kaitannya dengan ruang fiskal yang terbatas, stimulus harus



ditujukan untuk masyarakat yang paling rentan dan untuk sektor bisnis dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdasarkan kelompok pendapatan dan sektor ekonomi yang paling terdampak," ujarnya.

Ecky menyampaikan pendapatnya yang konsisten dengan sikap FPKS dalam mengutamakan rakyat dan

usaha kecil.

"Singkatnya, kondisi ekonomi Indonesia yang memasuki resesi ini adalah akibat ketidakseriusan dan tidak efektifnya Pemerintah dalam penanganan Covid-19. Dan jika tidak ada perbaikan, peluang kondisi ekonomi dunia paska Biden terpilih, tak bisa kita optimalkan" pungkask Ecky mengakhiri.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Anggota Baleg DPR RI: Pengaturan Jalan Harus Perhatikan Hak Penyandang Disabilitas

"Sesuai perkembangan zaman tentu ada hal-hal terkait sarana transportasi yang harus diperbaiki, baik dari sisi teknis pembangunan, pemeliharaan maupun kebijakan. Kami tentu menyambut baik usulan perbaikan Undang-Undang Tentang Jalan ini

Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Baleg DPR RI

Anggota Baleg: Pengaturan Jalan Harus Perhatikan Hak Penyandang Disabilitas

“Sesuai perkembangan zaman tentu ada hal-hal terkait sarana transportasi yang harus diperbaiki, baik dari sisi teknis pembangunan, pemeliharaan maupun kebijakan. Kami tentu menyambut baik usulan perbaikan UU Tentang Jalan ini

Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (12/11) — Memasuki masa sidang II Nopember 2020 Badan Legislasi DPR RI membuka kegiatan dengan diantaranya melakukan Rapat Pembahasan Harmonisasi RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

RUU yang merupakan usulan Komisi V DPR RI ini menegaskan tujuan pengaturan tentang jalan yang dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan jalan sebagai prasarana transportasi guna mencapai kesejahteraan masyarakat dengan peran

penting mendukung ekonomi sosial budaya, pemerataan pembangunan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menanggapi positif usulan perubahan atas Undang-Undang No 38 Tahun 2004 Tentang jalan, karena menurutnya memang ada beberapa hal yang sudah sepatutnya direvisi karena perubahan-perubahan yang perlu dilakukan untuk mengikuti

tuntutan perkembangan zaman.

“Sesuai perkembangan zaman tentu ada hal-hal terkait sarana transportasi yang harus diperbaiki, baik dari sisi teknis pembangunan, pemeliharaan maupun kebijakan. Kami tentu menyambut baik usulan perbaikan Undang-Undang Tentang Jalan ini,” tegasnya.

Secara khusus, Ledia kemudian mengingatkan kepada para pembahas untuk memasukkan hak-hak para penyandang disabilitas ke dalam muatan revisi RUU ini.

“Undang-Undang No 8 Tahun 2016 telah memberi amanah kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak para Penyandang Disabilitas diantaranya Hak Aksesibilitas yang tercantum dalam Pasal 18 dimana para Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; serta mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu,” terang Anggota Komisi X DPR RI ini.



Karenanya, lanjut Ledia, terkait dengan RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang tengah diharmonisasi ini, mantan Ketua Panja RUU Penyandang Disabilitas Tahun 2015 ini lantas menyoroti pasal 11 dan pasal 35A dari draft usulan.

Menurutnya Pasal 11 haruslah memastikan ruang manfaat jalan yang disebut pada ayat 2 (a) harus memenuhi kualifikasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terutama pada jalan 2 yang menuju tempat 2 pelayanan publik termasuk

jalan nasional yang melintasi kota.

“Ayat 4 di pasal 11 draft usulan ini sebenarnya sudah mendedahkan fasilitas-fasilitas yang perlu ada namun belum memasukkan klausul yang mendukung hak aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas. Karenanya perlu ada penambahan kalimat yang secara khusus menyatakan penyediaan sarana prasarana bagi para penyandang disabilitas,” tandasnya.stok di petani.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Legislator PKS Desak Pemerintah Terbitkan Perppu UU Cipta Kerja

“Sejak awal UU ini memang menimbulkan masalah. Mulai dari pembahasan yang terburu-buru, tidak melibatkan pihak-pihak terkait, pengesahan di DPR yang terkesan dipaksakan, revisi pasca-pengesahan, gonta-ganti naskah, dan sekarang setelah ditandatangani Presiden masih ada berbagai kesalahan

Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (04/11) – Wakil Ketua PKS DPR RI, Mulyanto meminta Pemerintah segera menerbitkan Perppu terkait Undang-Undang Cipta Kerja.

Menurut Mulyanto, ini merupakan keputusan yang logis sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas berbagai kekeliruan yang terjadi dalam proses dan hasil akhir UU Cipta Kerja.

“Sejak awal UU ini memang menimbulkan masalah. Mulai dari pembahasan

yang terburu-buru, tidak melibatkan pihak-pihak terkait, pengesahan di DPR yang terkesan dipaksakan, revisi pasca-pengesahan, gonta-ganti naskah, dan sekarang setelah ditandatangani Presiden masih ada berbagai kesalahan. Jadi langkah yang bijak menurut saya, Pemerintah segera menerbitkan Perppu pembatalan UU Cipta Kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada rakyat” terang Mulyanto. Mulyanto menilai

rangkai kekeliruan tersebut terjadi akibat prosedur pembentukan perundangan yang kejar tayang, mengikuti arahan Presiden yang meminta agar pembahasan RUU ini diselesaikan dengan cepat.

“Ini adalah pengalaman buruk dalam pembentukan perundangan-perundangan, sepanjang umur berdirinya republik ini” ungkap Mulyanto.

Oleh sebab itu, Mulyanto berpendapat Perppu merupakan alternatif penyelesaian masalah yang lebih efisien dibanding judicial review di Mahkamah Konstitusi.

“Dengan Perppu maka secara keseluruhan UU ini bisa dibatalkan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga energi bangsa ini dapat kita fokuskan untuk menanggulangi pandemi Covid-19” ucap Mulyanto sebagai penutup.



Terus Menuai Polemik

Aleg PKS: Pemerintah Harus Terbitkan Perppu

“Ada dua opsi untuk menyikapi polemik tentang Undang-Undang Cipta Kerja, opsi melakukan legislative review, dan opsi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perppu. Hingga saat ini, PKS cenderung tidak memilih opsi Legislative Review.

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (04/11) – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, mengajukan dua opsi untuk menyikapi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang terus menuai polemik.

Hal tersebut menyusul keterangan Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin (2/11/2020). Kemudian, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendaftarkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (03/11/2020).

Selain itu, KSPI juga masih

akan melanjutkan aksi serta mogok kerja, sesuai dengan hak konstitusional buruh yang teratur dalam Undang-Undang, yang bersifat anti kekerasan (non-violence).

“Ada dua opsi untuk menyikapi polemik tentang Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Anis Byarwati, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS yang juga sempat menjadi Anggota Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja saat sedang dibahas di DPR.

Kedua opsi yang dimaksud Anis adalah opsi melakukan legislative review, dan opsi

menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perppu. Hingga saat ini, Anis menjelaskan bahwa PKS cenderung tidak memilih opsi Legislative Review.

“Legislative review adalah upaya untuk mengubah suatu undang-undang melalui DPR. Sederhananya, Legislative review ini adalah proses pengusulan undang-undang baru atau revisi undang-undang. Hal itu diatur UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan,” papar Anis.

Karena tidak berbeda dengan proses pembuatan undang-undang, maka legislative review undang-undang Cipta Kerja juga harus melalui 5 tahapan pembuatan undang-undang, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.

Artinya, Pemerintah dan DPR harus berkomunikasi tentang siapa yang menginisiasi legislative review dengan mengajukan poin-poin revisi. Jika diterima DPR, Undang-



Undang Cipta Kerja akan kembali dibahas dalam rapat-rapat di DPR.

“Prosesnya seperti mulai dari awal lagi, Karena itu merupakan sikap politik PKS setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini diundangkan oleh Presiden, adalah mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perppu” tandas Anis.

Anis menyatakan, bahwa saat ini sangat urgen menerbitkan Perppu karena telah terjadi situasi kegentingan yang memaksa seperti yang disebutkan dalam dalam kriteria putusan MK 138/PUU-VII/2009.

“Situasi kegentingan yang memaksa seperti yang disebutkan dalam kriteria putusan MK

138/PUU-VII/2009 adalah pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Dan kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang, tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum itu tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sementara keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan,” jelas Anis.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Sosialisasikan RUU Lansia

Bukhori: Satukan Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Memuliakan Orang Tua

“Secara filosofis, UU yang lama berangkat dari cara berpikir yang memposisikan lansia dari aspek residual, yakni kelompok sosial yang membutuhkan belas kasih

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Serang (11/11) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mengungkapkan DPR akan merombak secara total Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia).

Bukhori menilai peraturan perundang-undangan yang lama sudah tidak relevan dan membutuhkan konstruksi berpikir yang baru seiring dengan terjadinya disrupsi moral di tengah masyarakat.

“Secara filosofis, UU yang lama berangkat dari cara berpikir yang memposisikan lansia dari aspek residual, yakni kelompok sosial yang membu-

tuhkan belas kasih. Semestinya, sebagai warga negara dimana agama adalah salah satu sumber budayanya, kita harus mendudukan orang tua pada posisi yang bermartabat, yakni posisi yang tidak terpisahkan dari kesatuan masyarakat,” papar Bukhori dalam kunjungan Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI ke Pemerintah Kota Serang Provinsi Banten dalam rangka menjangkau aspirasi untuk penyusunan RUU Lansia, Rabu (11/11).

Untuk diketahui, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan

Lanjut Usia telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan diusulkan oleh DPR pada 17 Desember 2019.

Anggota Baleg ini menambahkan, spirit yang dibawa oleh Fraksi PKS melalui RUU ini adalah dalam rangka mendorong penyatuan antara kearifan budaya Indonesia, yakni penghormatan pada orang tua, dengan kemampuan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan orang lanjut usia.

Pasalnya, Bukhori memandang bahwa segala pemenuhan hak lansia tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada tanggungjawab negara mengingat APBN yang terbatas.

“Jika secara proporsi, jumlah lansia pada 2045 diprediksi membentuk 20% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 300 juta penduduk, maka akan ada sekitar 60 juta lansia di kemudian hari.

Sedangkan terdapat sekurang-kurangnya 17 hak lansia yang wajib dipenuhi sebagaimana



diatur dalam regulasi. Dengan demikian, bila tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya peran keluarga, maka upaya untuk merealisasikan kesejahteraan kelompok lansia dalam segala aspek yang relevan muskil terwujud,” bebernya.

Sebab itu, demikian Bukhori melanjutkan, RUU ini harus mampu melegalkan dan melembagakan budaya menghormati dan perlakuan baik terhadap orang tua melalui dukungan secara proporsional antara masyarakat dan pemerintah.

Dengan kata lain, lanjutnya, pemerintah tidak lagi perlu membangun lebih banyak panti untuk lansia, akan tetapi panti-panti yang ada justru akan dikhususkan untuk mengako-

modir lansia yang terlanjar.

Sedangkan bagi lansia yang tidak terlanjar, RUU ini akan mendorong penguatan peran keluarga dalam pemenuhan tanggung jawab mereka terhadap lansia yang hidup di tengah-tengah mereka.

“Apakah kemudian pola dari pemenuhan tanggung jawab ini melalui pendekatan punishment (hukuman) atau pembinaan, kita akan terus pertajam diskursus ini sehingga mencapai kesesuaian dengan apa yang dibutuhkan. Meskipun demikian, dari Fraksi PKS sendiri sebenarnya cenderung pada pendekatan pembinaan melalui model rekayasa sosial yang diatur secara sistematis,” sambungnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Terima Kasih **PAHLAWAN**

Hari Pahlawan - 10 November 2020

Hakikat Kepahlawanan adalah **kontribusi**
dan **dedikasi, karya nyata** lebih esensi
daripada **gelar pahlawan** itu sendiri

Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Habib Aboe Tegaskan Hari Pahlawan Jadi Momentum Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Sebagai generasi penerus bangsa, memperingati kepahlawanan berarti adalah tugas kita untuk merawat kemerdekaan. Kita memiliki tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan atas bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa ini setidaknya ada tiga, pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kedua untuk memajukan kesejahteraan umum, dan ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Ketua MKD DPR RI

Jakarta (10/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang merupakan Sekretaris Jenderal PKS Aboebakar Al-Habsy menyampaikan bahwa Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November adalah momen yang baik bagi bangsa Indonesia untuk mengambil

setiap hikmah di dalamnya.

Menurut pria yang akrab disapa Habib Aboe, peringatan Hari Pahlawan perlu dimaknai oleh setiap anak bangsa untuk memberi sumbangsih terbaik bagi negara.

"Memperingati hari pahlawan adalah soal ke-

Indonesiaan. Momen ini mengingatkan kembali agar kita tidak mengkhianati warisan para pahlawan. Mereka telah berkorban dengan harta dan jiwa untuk memperjuangkan kemerdekaan. Oleh karenanya, jangan ada anak bangsa yang berpikir bekerja untuk kepentingan asing. Karena hal itu mengkhianati jasa-jasa para pahlawan kita terdahulu", ujar Habib Aboe dalam keterangannya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (10/11).

Anggota Komisi III DPR RI ini pun menyatakan bahwa generasi bangsa perlu melanjutkan perjuangan para pahlawan.

"Sebagai generasi penerus bangsa, memperingati kepahlawanan berarti adalah tugas kita untuk merawat kemerdekaan. Kita memiliki tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan atas bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa ini setidaknya ada tiga, pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kedua untuk



memajukan kesejahteraan umum, dan ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa", jelas Habib Aboe.

Menurutnya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak hanya berarti secara fisik. Namun bermakna melindungi kepentingan-kepentingan rakyat, jangan sampai kepentingan rakyat dikalahkan dengan kepentingan asing. Sedangkan melindungi tumpah darah Indonesia, berarti kita punya komitmen tinggi untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada hanya untuk kepentingan anak bangsa.

Selain itu, lanjutnya, rakyat

Indonesia perlu memaknai cita-cita bangsa dalam konteks kekinian, semisal saat pandemi Covid-19 sekarang ini.

"Pada konteks pandemi, melindungi segenap bangsa Indonesia berarti kita harus bekerja keras untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman Covid-19. Perjuangan dalam melawan Covid-19 adalah bentuk kekinian dalam meneladani semangat kepahlawanan. Tentunya, hal ini harus dipelopori oleh pemerintah yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan negara", pungkashabib Aboe.



Maknai Hari Pahlawan

Anis Ajak Anak Bangsa Bekerja Sungguh-sungguh bagi Bangsa dan Negara

Siapa pun yang berkreasi dan bekerja dengan totalitas untuk bangsa dan negara Indonesia, dengan ketulusan niat dan penuh pengorbanan, maka mereka adalah pahlawan bangsa hari ini

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (11/11) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati memaknai Hari Pahlawan yang jatuh pada Selasa, (10/11/2020)

Menurut Anis, biasanya Hari Pahlawan dilakukan dengan berkunjung ke makam Pahlawan atau mengunjungi para veteran perjuangan Kemerdekaan RI.

"Ada juga yang melakukan perenungan dan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan bangsa," tutur Anis.

Berbagai kegiatan, ungkap Anis, adalah upaya banyak orang untuk mengingat dan

menghargai jasa para pahlawan bangsa.

"Semangat perjuangan para pahlawan, seharusnya menjadi semangat kita semua sebagai bangsa Indonesia. Bangsa yang tidak pernah lupa dengan pengorbanan para pahlawannya," terang Anggota Komisi XI DPR RI ini.

Anis menambahkan, semangat yang dimiliki para pejuang dimasa perang kemerdekaan dan semangat yang dimiliki anak-anak bangsa pada masa sekarang, seharusnya juga tidak berubah.

"Perbedaannya, jika dahulu para pahlawan berjuang

menghadapi penjajah, maka perjuangan di era modern sekarang tentunya memiliki cara yang berbeda," pungkasnya.

Ada perjuangan menghadapi permasalahan bangsa, kata Anis, seperti masalah ekonomi dan pendidikan, perjuangan melawan korupsi, dan belakangan ini perjuangan melawan pandemi Covid-19.

"Maka, apresiasi kepahlawanan hari ini selayaknya diberikan kepada para pejuang ekonomi, para pejuang pendidikan, para pejuang anti-korupsi dan para



tenaga kesehatan yang belakangan ini juga kita kenal sebagai pahlawan-pahlawan di bidang kesehatan," tandas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

Peluang untuk menjadi pahlawan, imbuhnya, adalah dengan berjuang di bidang kita masing-masing sangat terbuka lebar.

"Siapa pun yang berkreasi dan bekerja dengan totalitas untuk bangsa dan negara Indonesia, dengan ketulusan niat dan penuh pengorbanan,

maka mereka adalah pahlawan bangsa hari ini," ujarnya.

"Mari kita maknai hari Pahlawan 10 November 2020, dengan berkreasi dan bekerja sepenuh hati dan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk berbakti kepada bangsa dan negara serta beribadah kepada Allah SWT. Semoga Allah Yang Maha Kuasa, meridhoi semua upaya kita. Aamiin. Salam perjuangan, selamat Hari Pahlawan!," tutup Anggota DPR asal Jakarta Timur ini.



Hari Pahlawan saat Pandemi

Netty: Perjuangan Pahlawan Jadi Contoh dalam Melawan Covid-19

Tenaga kesehatan baik dokter dan perawat yang gugur dalam menangani Covid-19 sangat layak kita berikan penghargaan sebagai pahlawan kemanusiaan. Mereka telah rela berkorban jiwa dan raga meskipun tahu bahaya yang akan mereka hadapi dalam merawat pasien Covid-19

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (11/11) — Bangsa Indonesia Selasa kemarin memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada setiap tanggal 10 November.

Akan tetapi tahun ini, menurut Netty Prasetyani, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Hari Pahlawan diperingati di tengah suasana bangsa yang sedang berjuang melawan Pandemi Covid-19.

"Pahlawan adalah orang yang berjuang membela kebenaran, mereka tidak pernah mementingkan diri sendiri, serta selalu siap untuk berkorban jiwa dan raga dalam membela yang benar. Pada

masa pandemi ini sudah seharusnya kita mencontoh semangat perjuangan para pahlawan dalam melawan Covid-19. Jika dulu para pahlawan banyak yang gugur dalam perang melawan penjajah, maka hari ini kita harus melanjutkan perjuangan mereka dalam perang melawan Covid-19", kata Netty dalam keterangan media-nya, Selasa (10/11/2020).

Menurut Netty yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, tanpa adanya pengorbanan dan kerja keras akan sangat sulit untuk menangani pandemi Covid-19 di tanah air.

"Perlu ada kerja keras dan

strategi penanganan yang kongkrit di lapangan agar kita mampu menahan laju pandemi di tanah air yang hingga Senin kemarin sudah mencapai 440.569 orang. Kita harus bertanya kepada pemerintah, sudah sejauh apa penanganannya? Bagaimana dengan gerakan 3T dan 3M yang tampaknya semakin longgar? Seperti apa kelanjutan vaksin baik yang di dalam negeri maupun yang bekerjasama dengan pihak luar? Ini harus dijawab oleh pemerintah", kata Netty.

Netty juga berharap selain mengenang jasa Pahlawan kemerdekaan, bangsa Indonesia juga harus mengenang jasa dokter dan tenaga kesehatan yang gugur dalam melawan Pandemi Covid-19.

"Tenaga kesehatan baik dokter dan perawat yang gugur dalam menangani Covid-19 sangat layak kita berikan penghargaan sebagai pahlawan kemanusiaan. Mereka telah rela berkorban jiwa dan raga meskipun tahu bahaya yang akan mereka hadapi dalam merawat pasien Covid-19",



tambah Netty.

Peringatan Hari Pahlawan tahun ini agak spesial karena selain diperingati di tengah Pandemi Covid-19 juga adanya pemberian gelar Pahlawan terhadap enam tokoh Indonesia, yakni Sultan Baabullah dari Provinsi Maluku Utara, Machmud Singgirei Rumagesan dari Provinsi Papua Barat, Jenderal Pol (Purn) Raden Said Soekanto Tjokrodijatmodjo dari provinsi DKI Jakarta, Arnold Mononutu dari Provinsi Sulawesi Utara, Sutan

Mohammad Amin Nasution dari Sumatera Utara, dan Raden Mattaher bin Pangeran Kusin Bin Adi dari Provinsi Jambi.

"Jasa mereka harus selalu kita kenang sepanjang masa dan generasi penerus bangsa hari ini harus melanjutkan cita-cita para pahlawan dengan kerja yang nyata terutama di masa pandemi Covid-19. Kerja keras dan kerjasama akan mampu membuat Indonesia bangkit melawan Pandemi Covid-19", tandas Netty.

Peringatan Hari Pahlawan

Nevi: Dokter dan Tenaga Medis Pahlawan 2020 Melawan Covid-19

"Di masa yang serba tidak menentu seperti saat ini, wabah terus berlangsung, ekonomi negara terguncang, kehidupan masyarakat ikut bergejolak, perlu ada saling bantu-membantu untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia. Banyak pahlawan-pahlawan muncul di tengah masyarakat, dan salah satunya adalah para dokter dan tenaga medis

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (09/11) — Joe Biden diproyeksikan sebagai Pemenang pemilu AS, Sabtu (7/11) siang waktu Amerika Serikat. Meski belum final karena masih ada upaya perlawanan Trump sebagai incumbent, kemenangan Biden diyakini banyak pihak memberikan harapan perbaikan dalam penanganan pandemi

Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Amerika Serikat.

Terpilihnya Biden ini secara otomatis diprediksi juga akan memengaruhi hubungan ekonomi AS dengan China yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap iklim ekonomi global.

Namun demikian, Ecky Awal Mucharam Anggota DPR RI

Komisi XI dari Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah agar lebih serius dalam menangani Covid-19 yang menjadi penyebab terjadinya resesi. Ditengah harapan publik AS dan dunia, saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih kontraksi akibat dampak Covid 19.

Sebagaimana diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan kuartal III/2020 _YoY_ Indonesia minus 3,49 persen.

Dari Gedung Nusantara I DPR RI, Ecky menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2020 negatif (-) 3,49 persen menjadi bukti bahwa penanganan Covid-19 oleh pemerintah belum serius dan belum efektif.

"Pemerintah juga belum mampu mendorong publik untuk patuh pada protokol Covid-19. Di sisi lain, program PEN juga belum menunjukkan hasil yang optimal," ungkap Ecky.

Ecky juga mengingatkan bahwa jika pemerintah tidak



memperbaiki kinerjanya dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maka kuartal IV/2020 juga akan kembali mengalami pertumbuhan negatif. Dan Indonesia bisa kehilangan momentum perbaikan ekonomi di tahun 2021.

Legislator PKS ini juga menegaskan jangan pernah Pemerintah berfikirkan bahwa solusi pamungkas penanganan Covid-19 adalah hanya vaksinasi masal. Sampai dengan saat ini belum ada vaksin Covid-19 yang lolos uji dan direkomendasikan WHO. Selain itu, perlu waktu yang lama sampai berbulan-bulan dalam melakukan proses vaksinasinya.

"Saat ini Kita harus belajar pada tetangga kita Singapura,

Malaysia, Korea Selatan dan Jepang yang berhasil menekan laju penyebaran Covid-19," kata Ecky.

"Kemudian kaitannya dengan ruang fiskal yang terbatas, stimulus harus ditujukan untuk masyarakat yang paling rentan dan untuk sektor bisnis dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdasarkan kelompok pendapatan dan sektor ekonomi yang paling terdampak," ujarnya.

Ecky menyampaikan pendapatnya yang konsisten dengan sikap FPKS dalam mengutamakan rakyat dan usaha kecil.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



OPINI

Selasa, 10 November 2020

Menjadi Pahlawan di Masa Pandemi Covid-19

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYANTI, M. Si.

Anggota Komisi IX DPR RI



Menjadi Pahlawan di Masa Pandemi Covid-19

Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.

Anggota Komisi IX DPR RI

Hari Pahlawan tahun ini dijalani dengan kondisi yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sangat mungkin tidak ada lagi upacara bersama di berbagai instansi untuk memperingati Hari Pahlawan mengingat Indonesia masih dalam situasi pandemi covid-19 yang juga belum berakhir. Bahkan kasus baru harian secara nasional masih diatas 3500 kasus.

Sebagian kegiatan sosial-ekonomi masih dibatasi dengan pemberlakuan Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan beberapa bentuk dan nama dengan adanya pelonggaran. Bahkan sebagian besar sekolah masih belum melakukan pembelajaran tatap muka langsung dan masih menjalankan pembelajaran jarak jauh secara online.

Perang Semesta Melawan Pandemi Covid-19

Wabah covid-19 memang memberikan dampak yang

sangat besar bukan hanya dari sisi kesehatan, namun juga pada hampir semua sisi kehidupan. Inilah pandemi penyalit menular yang paling parah dan memberikan dampak besar setelah wabah Spanish Flu yang terjadi sekitar 100 tahun lalu.

Pandemi ini juga menyebar di hampir seluruh negara di dunia. Berdasarkan data dari wordometer, per tanggal 8 November 2020, jumlah yang terinfeksi covid-19 di seluruh dunia telah mencapai 50,39 juta orang di 218 negara. Sementara jumlah yang meninggal dunia akibat covid-19 ini mencapai 1,25 juta orang serta 35,62 juta orang telah berhasil sembuh.

Sampai saat ini Jumlah kasus baru terjadi 146.125 kasus dan kematian harian mencapai 2582 kasus di seluruh dunia. Di Indonesia sampai saat ini jumlah yang terinfeksi 440,569 orang, dan meninggal mencapai 14,689 orang.

Wabah covid-19 memang memberikan dampak yang sangat besar bukan hanya dari sisi kesehatan, namun juga pada hampir semua sisi kehidupan. Inilah pandemi penyalit menular yang paling parah dan memberikan dampak besar setelah wabah Spanish Flu yang terjadi sekitar 100 tahun lalu.



Wabah covid-19 memberikan dampak sangat besar bagi segala lini kehidupan

Image : Tribunews

Menjadi Pahlawan di Masa ... hal 2



Mereka yang terinfeksi covid-19 pun tidak mengenal kalangan. Dari pimpinan negara, Menteri, pengusaha, tentara, polisi, atlet sampai rakyat biasa terinfeksi covid-19. Bahkan cukup banyak tenaga medis yang juga terinfeksi, padahal tenaga medis inilah yang sangat diandalkan dalam menangani orang yang terinfeksi covid-19.

Demikian pula dengan korban jiwa akibat covid-19 ini yang menyasar berbagai kalangan dari pejabat

Kementerian, kepala daerah, anggota DPR/DPRD bahkan juga tenaga medis.

Di Indonesia Jumlah tenaga medis yang meninggal dunia akibat covid-19 menurut data Ikatan Dokter Indonesia sampai 3 Oktober mencapai 130 dokter dan 92 perawat dengan 4 diantaranya adalah Guru Besar. Tentu saja ini merupakan kehilangan besar bagi Indonesia karena untuk mencetak satu tenaga medis apalagi dokter spesialis bukanlah hal yang mudah. Apalagi

Di Indonesia Jumlah tenaga medis yang meninggal dunia akibat covid-19 menurut data Ikatan Dokter Indonesia sampai 3 Oktober mencapai 130 dokter dan 92 perawat dengan 4 diantaranya adalah Guru Besar. Tentu saja ini merupakan kehilangan besar bagi Indonesia karena untuk mencetak satu tenaga medis apalagi dokter spesialis bukanlah hal yang mudah

rasio antara jumlah tenaga medis dengan jumlah penduduk di Indonesia masih sangat kecil.

Sifat dari virus SARS Cov-2 yang menular human to human melalui droplet secara langsung atau menempel di permukaan dan bahkan dalam penelitian terakhir juga bisa airborne (melalui hembusan nafas) membuat cara paling efektif dalam mengurangi penularan adalah melalui pembatasan sosial dan fisik (social distancing), membiasakan mencuci tangan dengan sabun

dan selalu memakai masker.

Hal inilah yang membuat berbagai kegiatan dibatasi bahkan dihentikan, termasuk kegiatan ekonomi, Ini memberikan dampak yang dahsyat terhadap perekonomian karena menyebabkan banyak kegiatan ekonomi terpuruk, kegiatan usaha tutup, pengangguran meningkat dan daya beli merosot tajam.

Menjalankan protokol kesehatan dan 3M (Menjaga jarak, Masker, Mencuci tangan) juga bukan hal yang mudah di-

jalankan oleh masyarakat apalagi dalam waktu lama karena membutuhkan pembiasaan dan kesabaran. Namun kita semua tentu sangat berharap bahwa pandemi ini segera berakhir dan kembali hidup normal dan beraktivitas seperti biasa.

Pejuang Garda Terdepan

Dengan sifat penyebaran virusnya dan bahayanya yang ditimbulkan, maka covid-19 tidak bisa dihadapi hanya oleh perseorangan saja.

Penyelesaian covid-19 juga tidak bisa diserahkan hanya kepada para tenaga medis melalui pengobatan dan perawatan. Bahkan jiwa mereka sendiri terancam tertular oleh virus berbahaya ini.

Perlawanan harus dilakukan secara bersama-sama dengan memutus mata rantai penularan ditengah masyarakat. Memutus mata rantai penularan

berarti semua pihak dan orang yang berada di daerah dimana pandemi terjadi harus terlibat dalam upaya ini dengan melakukan berbagai upaya untuk mencegah penularan virus yang begitu mudah menyebar ini.

Kita seringkali menyebut para tenaga medis yang berjibaku menangani pasien covid-

Menjadi Pahlawan di Masa ...

hal 3

19 sebagai pejuang garda terdepan dalam perang melawan covid-19. Mungkin ini didasarkan bahwa tenaga medis ini setiap hari berhadapan dengan para pasien yang didalamnya terdapat virus SARS Cov-2 ini dan juga berada di lingkungan dengan tingkat kepadatan virus yang tinggi.

Namun sesungguhnya ketika orang yang terinfeksi covid-19 sudah berada di perawatan di RS dan ditangani oleh tenaga medis, maka tenaga medis ini menjadi benteng terakhir dalam menolong pasien yang sudah terpapar covid-19. Lalu siapa yang menjadi garda terdepan dalam perang semesta melawan pandemi covid-19 ini?

Kunci untuk menghentikan pandemi covid-19 adalah memutus mata rantai penyebaran virus penyebabnya. Maka karena penyebaran berlangsung secara human to human, kuncinya adalah menjadikan setiap kita tidak tertular virus dan tidak juga menjadi penular virus kepada orang lain.

Caranya adalah dengan menjadikan diri kita berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan 3M dalam kehidupan kita sehari-hari. Karenanya, sesungguhnya setiap orang yang berada di

daerah pandemi adalah pejuang garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Pilihan ada di kita apakah akan melakukan perlawanan dalam perang semesta ini dengan disiplin protokol kesehatan dan menerapkan 3M atau berperang secara nekat dengan mengabaikan pertahanan diri dan menjadi korban, lalu menyebarkan virus kepada orang lain karena ketidakpedulian kita.

Di sisi lain, Pemerintah juga tidak boleh kendor

melakukan upaya-upaya pengendalian penyebaran virus dengan intensif melakukan testing terhadap orang yang menjadi suspect covid-19, melakukan penelusuran (Tracing) terhadap orang-orang yang memiliki riwayat kontak dekat dengan mereka yang terinfeksi, agar orang tersebut segera melakukan isolasi dan tidak menularkan ke orang lain serta juga dilakukan uji swab terhadap orang tersebut.

Pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan penanganan dan

perawatan (Treatment) terhadap orang-orang yang terinfeksi covid-19 melalui fasilitas-fasilitas kesehatan agar bisa sembuh dan kembali hidup normal

Jika kita ingin menjadi pejuang sesungguhnya dalam perang semesta melawan covid-19, maka yang kita lakukan adalah melakukan perlawanan dengan menerapkan protokol kesehatan dan 3M dalam segala aktivitas kita dan mengajak orang lain untuk melakukan perlawanan yang sama.

Kita juga bersama-sama

membantu orang yang terinfeksi covid-19 dengan memberikan bantuan kepada keluarganya yang harus menjalani isolasi agar kebutuhannya terpenuhi, maupun bantuan vitamin dan suplemen yang dibutuhkan maupun kepada pasien tersebut dengan memberikan semangat dan dukungan yang kita bisa. Bukan justru memberikan stigma negatif dan menjauhkan mereka yang terinfeksi dengan tidak memberikan bantuan apapun.

Tidak tepat jika kita menyerahkan seluruhnya



Memutus mata rantai penularan covid-19 harus dilakukan bersama-sama

Image : Merdeka.com

Perlawanan harus dilakukan secara bersama-sama dengan memutus mata-rantai penularan ditengah masyarakat. Memutus mata rantai penularan berarti semua pihak dan orang yang berada di daerah dimana pandemi terjadi harus terlibat dalam upaya ini dengan melakukan berbagai upaya untuk mencegah penularan virus yang begitu mudah menyebar ini

Menjadi Pahlawan di Masa ...

Tamat



Jadilah pahlawan dengan Tetap menggunakan masker saat beraktivitas dan keluar rumah

Image : Istimewa

Mereka yang secara sukarela membagikan masker adalah pahlawan. Mereka yang konsisten memakai masker dengan baik jika keluar atau beraktivitas adalah pahlawan. Mereka yang memilih untuk tetap di rumah dan tidak keluar jika tidak sangat penting adalah pahlawan

kepada tenaga medis untuk penanganan pasien covid-19 dengan membiarkan semakin banyak orang terinfeksi.

Pahlawan di Masa Pandemi

Mengenang Hari Pahlawan tahun ini, maka kita memang sangat patut memberikan gelar pahlawan kepada para petugas medis di semua lini yang menangani orang-orang yang terinfeksi covid-19.

Dari mulai dokter spesialis, dokter umum, perawat, petugas laboratorium, sopir ambulance dan lain-lainnya yang mempertaruhkan tubuh mereka untuk bisa juga terpapar virus berbahaya ini. Bahkan ketika masih ada yang berpendapat bahwa covid-19 ini tidak ada, meskipun sudah belasan ribu di negeri kita yang meninggal dunia karena covid-19.

Para tenaga medis ini bahkan harus rela jauh dari keluarganya untuk menghindari penularan covid-19. Oleh karena ini jangan menambah beban mereka dengan membiarkan semakin banyak orang terpapar covid-19

Perang melawan covid-19 menjadi tugas semua dengan masing-masing fungsi dan kemampuan yang dimiliki. Perang agar virus covid-19 ini berhenti penyebarannya dengan

memutus mata rantai penularan. Perang melawan covid-19 tidak hanya tentang menangani dan mengobati mereka yang sudah terinfeksi covid-19, namun bagaimana memastikan virus tidak terus menular.

Perang agar kegiatan usaha dan ekonomi bisa kembali pulih secara bertahap dengan berbagai inovasi dan cara sehingga protokol kesehatan serta 3M tetap berjalan dalam kegiatan ekonomi.

Maka siapapun bisa menjadi pahlawan dalam perjuangan melawan covid-19 ini. Para tenaga medis yang berjuang menangani pasien adalah pahlawan. Para relawan yang mengkampanyekan 3M dan protokol kesehatan secara langsung maupun melalui sosial media adalah pahlawan.

Mereka yang secara sukarela membagikan masker adalah pahlawan. Mereka yang konsisten memakai masker dengan baik jika keluar atau beraktivitas adalah pahlawan. Mereka yang memilih untuk tetap di rumah dan tidak keluar jika tidak sangat penting adalah pahlawan. Mereka yang memilih untuk tidak ikut kegiatan yang menimbulkan kerumunan atau mencegah kegiatan yang menimbulkan kerumunan

adalah pahlawan.

Mereka yang membuat terobosan dan inovasi agar kegiatan ekonomi kembali berjalan dengan tetap mencegah penularan adalah pahlawan.

Pemerintah pusat dan daerah yang intensif menjalankan 3T (Testing-Tracing-Treatment) dan membuat kebijakan yang mendukung pencegahan penularan covid-19 adalah pahlawan. Para politisi yang terus mendorong pemerintah untuk terus mengendalikannya penularan covid-19 melalui anggaran dan kebijakan adalah pahlawan.

Para influencer di sosial media maupun para pemimpin di RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama di masyarakat yang terus mengingatkan protokol kesehatan dan penerapan 3M adalah pahlawan. Mereka yang menggalkan bantuan untuk keluarga yang terdampak ekonomi akibat covid-19 adalah pahlawan. Maka jadilah kita pahlawan di masa pandemi dengan peran kita masing-masing.

Selamat Hari Pahlawan



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Mari Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Rofik Hananto Salurkan Paket Konverter Kit bagi Petani di Kabupaten Purbalingga

“Program konversi BBM ke BBG merupakan salah satu solusi penyediaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, pemerintah melakukan kebijakan diversifikasi penggunaan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas sebagai bagian dari kebijakan energi nasional untuk mendukung ketahanan energi”

H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

Purbalingga (12/11) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Rofik Hananto kembali menyerahkan bantuan Paket konversi BBM ke BBG untuk mesin pompa air bagi petani sasaran di daerah pemilihannya, kali ini rofik mendistribusikan di Kabupaten Purbalingga.

Kegiatan sosialisasi sekaligus pendistribusian paket bantuan Konversi BBM ke BBG untuk Petani Sasaran di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan di UPT Perbenihan Dinas Perta-

nian Kab. Purbalingga pada Rabu, 11 November 2020.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Kekayaan Negara Dirjen Migas: Tony Ardi Priharjanto, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga: Mukodam, Sales Branch Manager Rayon VI Tegal PT Pertamina: Handy Tri Husodo, dan Cahyo Susilo selaku Ketua Fraksi PKS DPRD Kab. Purbalingga yang sekaligus mewakili Rofik Hananto yang berhalangan.

Sebanyak 171 Petani di

Purbalingga mendapatkan bantuan paket konverter kit berupa mesin pompa air, konverter kit BBM ke BBG, Tabung Lpg 3 Kg & Isinya.

Sebelumnya pria yang akrab dipanggil mas rofik ini juga telah mendistribusikan bantuan ini di Kabupaten Kebumen sebanyak 400 Paket.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Mukodam, dalam sambutannya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan kepada para petani di Purbalingga.

“Kami atas nama pemerintah Kabupaten Purbalingga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rofik Hananto selaku Anggota DPR RI Komisi VII dan kepada Kementerian ESDM atas bantuannya, ini membuktikan bahwa banyak yang memperhatikan dan peduli kepada para petani.” Kata Mukodam

Kepala Sub Bagian Kekayaan Negara Dirjen Migas Tony Ardi Priharjanto berpesan



kepada para petani agar bantuan ini dijaga dan tidak diperjualbelikan.

Ketua Fraksi PKS DPRD Purbalingga Cahyo Susilo mengatakan bantuan konverter kit merupakan program kemitraan Kementerian ESDM dan komisi VII DPR RI. Cahyo berharap dengan bantuan ini dapat meringankan biaya produksi para petani.

Di tempat lain Rofik mengatakan bahwa program ini sesuai dengan peraturan presiden nomor 38 tahun 2019 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga liquefied petroleum gas

untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran dan mesin pompa air bagi petani sasaran.

Program ini juga menjadi salah satu solusi energi alternatif yang lebih ramah lingkungan.

“Program konversi BBM ke BBG merupakan salah satu solusi penyediaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, pemerintah melakukan kebijakan diversifikasi penggunaan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas sebagai bagian dari kebijakan energi nasional untuk mendukung ketahanan energi” Kata Rofik

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Pembangunan Rusun Pesantren Annihayah

Ahmad Syaikhul dapat Apresiasi Pimpinan Pondok

“Saya ucapkan terimakasih kepada Kementerian PUPR. Ini aspirasi saya di dapil dan alhamdulillah direalisasikan. Kita doakan agar selesai sesuai target. Agar keluarga besar Pondok Pesantren Annihayah bisa merasakannya.

H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Jakarta (04/11) — Anggota DPR RI Ahmad Syaikhul menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Rusun Pesantren Annihayah, Karawang, Jawa Barat, Rabu, (4/11).

Syaikhul mendapat apresiasi dari pimpinan pondok karena telah memperjuangkan aspirasi mereka.

Syaikhul tiba di lokasi acara sekitar pukul 07.30 WIB. Anggota Komisi V itu mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah merealisasikan aspirasinya.

“Saya ucapkan terimakasih kepada Kementerian PUPR. Ini aspirasi saya di dapil dan alhamdulillah direalisasikan,”

kata Syaikhul.

Syaikhul berharap rusun ini akan selesai tepat waktu sehingga dapat segera dirasakan manfaatnya.

“Kita doakan agar selesai sesuai target. Agar keluarga besar Pondok Pesantren Annihayah bisa merasakannya,” harap Syaikhul.

Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Annihayah KH. Tatang Sihabuddin memberikan apresiasi kepada Ahmad Syaikhul.

“Atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Annihayah, saya mengucapkan terimakasih kepada Ustadz Ahmad Syaikhul. Aspirasi kami betul-betul diperjuangkan beliau,” ujar Pimpinan Pondok Pesantren

Annihayah, KH. Tatang Sihabuddin saat memberikan kata sambutan.

Rusun ini merupakan aspirasi dari Ahmad Syaikhul. Kabupaten Karawang merupakan daerah pilihannya (dapil), selain Kabupaten Bekasi dan Purwakarta.

Hadir dalam acara ini Kepala Balai Perumahan Jawa Barat Kementerian PUPR RI dan jajaran pimpinan Pemkab Karawang, antara lain: Sekretaris Daerah Aceh Jamhuri, Kepala Kemenag, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah, dan Tenaga Ahli DPR Budiwanto



Dimasa Reses Bukhori Salurkan 300 Paket Bantuan Sembako di Kab. Semarang

“Sebelumnya kami telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 150 juta untuk 300 ustaz dan guru ngaji di Kota Semarang. Untuk saat ini, kami bekerjasama dengan Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos mendistribusikan paket sembako kepada 300 KPM di Kabupaten Semarang

KH. BUKHORI, Lc., M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Kabupaten Semarang (03/11) – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf bekerja sama dengan Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada warga di Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yang terdampak Covid-19.

Bantuan sembako sebanyak 300 paket tersebut disalurkan langsung kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan turut

menggendong Yayasan Pendidikan dan Pesantren Islam Nurul Iman Tuntang.

“Sebelumnya kami telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 150 juta untuk 300 ustaz dan guru ngaji di Kota Semarang. Untuk saat ini, kami bekerjasama dengan Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos mendistribusikan paket sembako kepada 300 KPM di Kabupaten Semarang,” ujar Anggota Komisi VIII DPR RI

ini, Jumat (16/10/2020).

Politisi Dapil Jateng I ini menjelaskan bahwa program bantuan sembako ini berhasil terlaksana sebagai buah dari advokasi yang diupayakannya di parlemen.

Sebelumnya, Bukhori menerima banyak keluhan dan aspirasi dari masyarakat Kabupaten Semarang terkait minimnya bantuan dari pemerintah di kala pandemi.

“Sejujurnya saya prihatin mendapat keluhan tersebut. Karena itu, segera saya lakukan tindakan begitu kabar tersebut tervalidasi dengan segera menghubungi pihak Kementerian Sosial untuk kelas menurunkan bantuan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bukhori sengaja menggendong organisasi atau lembaga dari masyarakat lokal, antara lain Yayasan Pendidikan dan Pesantren Islam Nurul Iman dalam rangka memastikan bantuan tersebut sampai pada sasaran masyarakat yang prasejahtera.

“Mereka dan tim kami



melakukan pendataan dan verifikasi kepada calon penerima bantuan secara teliti. Kami tidak ingin sembarangan menyalurkan bansos untuk mengantisipasi salah sasaran, bahkan terjadinya kecurmuburan sosial. Karena itu kami mencoba hati-hati,” sambungnya.

Anggota Baleg ini berharap bansos tersebut bisa sedikit meringankan beban konstituennya di dapil.

Bukhori menambahkan, bantuan serupa akan terus diupayakan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai wakil rakyat Kabupaten Semarang di DPR RI.

“Kami ingin terus kebersamaan masyarakat kami dalam keadaan senang bahkan sulit. Semoga bantuan sembako ke depan bisa kami tingkatkan secara kuantitas dan kualitasnya,” pungkasnya

Legislator PKS: Rendang Jadi Kuliner Utama pada MTQ Nasional di Sumbar

Saya Apresiasi panitia pelaksana acara MTQ di Sumbar yang telah menyiapkan Rendang sebagai buah tangan para peserta MTQ nasional. Para peserta berasal dari seluruh pelosok Nusantara, yang artinya, yang mencicipi Rendang sebagai makanan khas Sumatera Barat adalah representasi masyarakat Indonesia dari berbagai daerah

Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Padang (03/11) — Legislator Pusat asal Sumatera Barat, Nevi Zuairina mengatakan, MTQ (Musabaqoh Tilawatil Quran) tingkat Nasional yang akan dilaksanakan di Sumatera Barat pada November ini menjadi moment memperkenalkan kekhasan daerah yang saat ini sudah mendunia.

Rendang, makanan khas asal Sumatera Barat sudah berkali-kali dirilis Media

Internasional sebagai makanan lezat di Dunia.

"Saya Apresiasi panitia pelaksana acara MTQ di Sumbar yang telah menyiapkan Rendang sebagai buah tangan para peserta MTQ nasional. Para peserta berasal dari seluruh pelosok Nusantara, yang artinya, yang mencicipi Rendang sebagai makanan khas Sumatera Barat adalah representasi masyarakat

Indonesia dari berbagai daerah. Kali ini MTQ tingkat Nasional baru diadakan kali kedua, setelah 30 tahun berlalu. Terakhir MTQ tingkat Nasional di Sumbar sekitar tahun 70an," urai Nevi.

Politisi PKS ini berharap, Rendang akan terus menjadi makanan yang dapat di nikmati dari zaman ke zaman. Saat ini memang Rendang sudah di kenal oleh masyarakat Nusantara bahkan dunia.

"Akan tetapi, di masa mendatang, bila resep asli yang sudah menjadi turun-temurun ditinggalkan, dikhawatirkan pesona Rendang sebagai makanan Khas Nusantara akan pudar," terang Nevi.

Sebagai diketahui, untuk menyiapkan buah tangan peserta MTQ Nasional, Pemprov Sumbar sebagai panitia sekaligus tuan rumah MTQ menganggarkan Rp. 1,5 milyar untuk pembuatan Rendang dengan resep terbaik asli Sumatera Barat.

"Saya berharap, 5.000 paket makanan khas



Minangkabau yang akan disiapkan, dapat dinikmati bukan saja peserta saja. Tetapi juga semua yang terlibat, termasuk para team suporting yang juga berasal dari berbagai daerah dapat menikmati Rendang ini", ucap Nevi.

Anggota DPR RI yang duduk di Komisi VI ini juga mengaku, dalam beberapa kesempatan, ia memperkenalkan Rendang kepada para anggota DPR baik di Komisi maupun di Fraksinya dengan berbagi cinderamata berupa rendang ini.

Anggota DPR RI yang duduk di Komisi VI ini juga mengaku, dalam beberapa kesempatan, ia memperkenalkan Rendang kepada para anggota DPR baik di Komisi maupun di Fraksinya

dengan berbagi cinderamata berupa rendang ini.

Nevi mengatakan, Lidah anggota DPR yang juga beragam berasal dari perwakilan tiap-tiap propinsi di Indonesia akan memiliki selera berbeda.

Nevi berkeyakinan, meski Rendang dari Sumatera Barat, akan mampu memberikan adaptasi rasa yang diterima oleh seluruh masyarakat penduduk Indonesia.

Nevi Menambahkan, adanya MTQ di Sumbar ini ia juga mengharapkan, para pelaku UMKM dapat diberikan kesempatan kontribusi keterlibatan berbagai instrumen.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

*You Stay At Home,
We Stay At Parliament*



Reses di Sagaranten Sukabumi

Slamet Bicara Soal Kesejahteraan Penyuluh Pertanian Lapangan

“Kontribusi sektor pertanian di kuartal II 2020 mengalami plus 6 persen. Artinya, sektor pertanian menjadi sektor yang paling diandalkan di tengah wabah virus corona. Dalam kondisi apapun persoalan pangan itu pasti penting dan dibutuhkan

drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI

Sukabumi (05/11) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet mengingatkan, pentingnya sektor pertanian di masa Pandemi Covid-19 ini.

Slamet mengatakan, kontribusi sektor pertanian di kuartal II 2020 mengalami plus 6 persen. Artinya, sektor pertanian menjadi sektor yang paling diandalkan di tengah wabah virus corona.

"Dalam kondisi apapun persoalan pangan itu pasti penting dan dibutuhkan," kata Slamet saat menggelar reses di wilayah Sagaranten, Kabupaten

Sukabumi, Kamis (05/11).

Slamet berujar, bila pemerintah ingin menggugulkan sektor pertanian, maka perlu memberi perhatian serius terhadap kesejahteraan penyuluh pertanian lapangan (PPL).

"InsyaAllah kita terus perjuangan kesejahteraan PPL ini. Karena mereka adalah ujung tombak pertanian kita," jelasnya.



Masa Reses

Andi Akmal Pantau Pembangunan Bantuan Jaringan Irigasi Tersier di Kabupaten Bone

Saya ucapkan terima kasih kepada Balitbangtan, Kementerian Pertanian yang telah melakukan pengawalan dan pendampingan kepada para petani dalam memproduksi benih padi tahan tungro ini. Dan yang sangat perlu diapresiasi adalah para petani kita yang terus bersemangat pada situasi pandemi, tidak surut kegiatannya dalam upaya memproduksi produk tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia

Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Kabupaten Bone (03/11) — Setelah membuka program pendampingan produksi benih varietas tahan tungro di Kabupaten Bone, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengunjungi lokasi irigasi tersier yang ia adakan atas ajuan aspirasi petani untuk meningkatkan produksi pertanian di daerahnya.

Akmal mengatakan, saat ini Balitbang Pertanian telah menemukan benih padi yang tahan terhadap Tungro. Upaya sektor Hulu dengan penyiapan bibit atau benih yang berkualitas, selanjutnya perlu penyiapan sarana produksi yang mampu menstabilkan lancarnya proses produksi juga perlu dilakukan. Salah satunya adanya irigasi tersier ini dengan alat

mesin pertanian berupa pompa air dan embung di sekitar lahan produksi sebagai instrumen memproduksi tanaman pangan berupa padi dapat melimpah hasilnya ketika panen.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Balitbangtan, Kementerian Pertanian yang telah melakukan pengawalan dan pendampingan kepada para petani dalam memproduksi benih padi tahan tungro ini. Dan yang sangat perlu diapresiasi adalah para petani kita yang terus bersemangat pada situasi pandemi, tidak surut kegiatannya dalam upaya memproduksi produk tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia", ucap Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini pada pemantauan lokasi pembangunan Irigasi tersier di kecamatan Cina Kabupaten Bone ini didampingi para petani dan para relawan yang terus mengupayakan pembangunan infrastruktur pertanian di daerah-daerah.

Akmal berharap, semua upaya penguatan sarana dan



prasarana pertanian dapat merata terpenuhi pada seluruh sentra produksi pertanian di Nusantara.

husus di daerah Indonesia Timur, Akmal berharap Sulawesi Selatan mampu menyediakan produk pangan masyarakat untuk seluruh wilayah Indonesia Timur.

"Sarana dan prasarana pertanian ini bila sudah merata di seluruh Indonesia terpenuhi

pada sentra produksi, Saya yakin, swasembada pangan ini bukan sekedar hanya cita-cita, tapi akan segera mampu di realisasi. Perlu komitmen semua pihak, bekerja tidak mengambil keuntungan pribadi, tapi mengutamakan cita-cita bersama untuk negara menjadi kunci suksesnya pencapaian swasembada pangan ini", tutup Andi Akmal Pasluddin.

Masa Reses, Aleg PKS Serahkan Kitab Tafsir Jalalain pada Ulama Kab. Tasikmalaya

“Alhamdulillah, kegiatan berbagi ilmu berupa kajian Islam selalu diselenggarakan pada setiap akhir bulan. Salah satu kegiatannya yakni mengkaji kitab tafsir Jalalain yang diikuti oleh ratusan tokoh ulama dari 4 kecamatan di kabupaten Tasikmalaya.

KH. TORIQ HIDAYAT, Lc

Anggota Komisi I DPR RI

Tasikmalaya (04/11) — Dipercaya berbagi ilmu dengan para tokoh ulama dari 4 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yakni Kecamatan Sodonghilir, Tanjungjaya, Sukaraja, dan Cibalong sejak tahun 2013 membuat Anggota DPR RI, Toriq Hidayat, sangat bersyukur.

“Alhamdulillah, kegiatan berbagi ilmu berupa kajian Islam selalu diselenggarakan pada setiap akhir bulan. Salah satu kegiatannya yakni mengkaji kitab tafsir Jalalain yang diikuti oleh ratusan tokoh ulama dari 4 kecamatan di kabupaten Tasikmalaya,” ungkapnya.

Pada masa reses kali ini, Toriq menyerahkan hibah Kitab Tafsir Jalalain sebanyak 100

eksemplar kepada para tokoh ulama dari 4 kecamatan (Sodonghilir, Tanjungjaya, Sukaraja, dan Cibalong) Kabupaten Tasikmalaya, peserta kajian rutin.

Menurut Toriq, Al-Jalalain artinya dua Jalal. Dinamakan demikian, karena kitab tafsir ini ditulis oleh dua orang ulama terkenal yaitu Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Abul Fadhl ‘Abdurrahman bin Abu Bakr, biasa disebut dengan Imam As-Suyuthi.

“Awalnya Jalaluddin Al-Mahalli menulis tafsir ini mulai dari surah Al-Kahfi sampai surah An-Naas. Dan ketika menyelesaikan tafsir surah Al-Fatihah, beliau wafat. Lalu

Jalaluddin As-Suyuthi pun melanjutkan. Beliau menulis dari tafsir surah Al-Baqarah hingga surah Al-Isra’”, jelas politikus asal PKS.

Senada dengan pendapat para ulama, Toriq menilai Kelebihan kitab tafsir ini ringkas dan mudah dipahami. Kemudian kitab ini menyebutkan pendapat yang rajih (kuat) dari berbagai pendapat yang ada.

“Para ulama menyampaikan keutamaan mempelajari tafsir Al-Quran adalah terhindar dari kesesatan di dunia dengan meniti jalan lurus yang ditunjukkan Al-Quran, serta masuk kedalam Surga dan selamat dari siksa di akhirat”, ungkapnya.

Kegiatan penyerahan hibah Kitab Tafsir Jalalain oleh Anggota Komisi I DPR RI ini mendapatkan respon positif dari para tokoh ulama setempat.

Toriq berharap kegiatan ini dapat membuktikan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Tasikmalaya bahwa PKS bukan termasuk partai yang hadir hanya pada saat mau Pileg saja.



Hermanto Serahkan Bibit kepada Masyarakat Padang, Solok dan Sijunjung

Pembagian bibit ini merupakan salah satu upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan

Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Padang (05/11) — Anggota DPR RI Dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan melakukan roadshow menyerahkan bibit bantuan Pemerintah kepada masyarakat Kota Padang, Kota Solok dan Sijunjung.

"Pembagian bibit ini merupakan salah satu upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan", ucap Hermanto.

Bibit-bibit ini, jelasnya, dianjurkan ditanam di awal musim penghujan sehingga perawatannya tidak terlalu sulit.

"Tapi kalau mau ditanam

sekarang juga tidak apa-apa yang penting disiram agar bibit tersebut tidak mati", papar legislator dari FPKS ini.

Lebih jauh Hermanto meminta agar bibit tersebut dirawat dengan baik.

"Beri pupuk secukupnya agar bibit tumbuh menjadi tanaman yang subur sehingga kelak hasilnya memuaskan," tuturnya.

Sekalipun yang diserahkan sama-sama bibit, namun nama programnya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Di Kota Padang, nama programnya Bibit Produktif. Bibit yang diserahkan durian unggul.

Penerimaanya kelompok tani Kubang Saiyo, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh.

Di Kota Solok, nama programnya Pengembangan Kawasan Jahe. Bibit yang diserahkan jahe gajah. Penerimaanya kelompok tani Tunas Muda, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah.

Di Sijunjung, nama programnya Pengembangan Perhutanan Sosial Nusantara. Bibit yang diserahkan pinang dan manggis. Penerimaanya KTH Aur Kuning, Jorong Koto Baru, Nagari Air Amo, Kecamatan Kamang Baru.



Masa Reses, Junaidi Auly Serahkan Alat Pertanian ke Gabungan Kelompok Tani

"Alhamdulillah masa reses kali ini bisa menyerahkan alat pertanian kepada dua gapoktan, dengan adanya alat ini semoga petani bisa mandiri dan makmur dalam usahanya,"

Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Lampung (07/11) — Anggota DPR RI dari Dapil Lampung II Junaidi Auly menyerahkan Alat Pertanian Combine Harvester kepada Kelompok Tani (Poktan) Ngudi Makmur Lampung Timur dan Gapoktan Buduh Luhur II Lampung Tengah.

Menurut Junaidi, kegiatan ini merupakan bentuk silaturahmi wakil rakyat kepada konstuentennya di dapil.

"Alhamdulillah masa reses kali ini bisa menyerahkan alat pertanian kepada dua gapoktan, dengan adanya alat ini semoga petani bisa mandiri dan makmur dalam usahanya," ujar Junaidi di Desa Rukti En-

dah, Seputih Raman, Lampung Tengah. Sabtu (07/11).

Aleg Fraksi PKS ini mengatakan, selain pemberian alat pertanian ini, nantinya poktan akan diberikan pembinaan serta edukasi berupa pelatihan manajemen keuangan dan perawatan alat combine ini sehingga petani tidak perlu khawatir terkait pengelolaan kelompoknya.

Selain itu, Legislator asal Lampung ini berharap Poktan penerima manfaat berupa alat pertanian ini mampu meningkatkan hasil pertanian secara signifikan sehingga nantinya para petani dapat

mewujudkan ketahanan pangan dan memberikan kontribusi nasional pencapaian swasembada pangan.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Poktan penerima alat combine yaitu Bapak Ngadiman menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih atas bantuan dan kepedulian Bapak Junaidi Auly kepada para petani di Lampung Timur dan Lampung Tengah.

"Kami berharap dengan bantuan alat ini kedepan hasil panen bisa melimpah, lebih mandiri, dan semoga bisa mensejahterakan kami para petani," ujarnya.



Kunjungi Sumbar dan Riau

Presiden PKS Instruksikan Anggota DPR dan DPRD Turun Menangkan Calon di Pilkada

Kami instruksikan khusus kepada Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/kota untuk berjuang memenangkan Pilkada 2020

H. AHMAD SYAIKHU

Presiden PKS

Pekanbaru (07/11) — Presiden PKS Ahmad Syaikhul terus bergerilya ke daerah-daerah untuk langsung memimpin Konsolidasi Pemenangan Pilkada 2020. Usai di Jawa Barat, pria yang akrab disapa Asyik ini melanjutkan Safari Pemenangan Pilkada 2020 di Sumatera Barat dan Riau.

Dalam arahannya, Presiden PKS menginstruksikan Anggota DPR RI dan DPRD asal PKS di seluruh Indonesia untuk memenangkan calon yang diusung dan didukung PKS pada Pilkada 2020.

"Pilkada 2020 adalah tangga sukses menuju kemenangan 2024. PKS sudah menetapkan target kemenangan 60 persen di seluruh Pilkada 2020. Semua komponen di PKS harus

all out di putaran terakhir. Kami instruksikan khusus kepada Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten/kota untuk berjuang memenangkan Pilkada 2020," kata Asyik dalam Konsolidasi Nasional Pilkada 2020 di Pekanbaru, Riau, Sabtu (07/11) petang.

Asyik menyebut sekarang saatnya untuk berjuang mengerjakan seluruh sumber daya dalam pemenangan Pilkada.

"Kita mungkin lelah tapi mereka juga lelah. Kita mungkin sulit mereka juga sulit. Kemenangan itu dipergilirkan diantara manusia. Jika calon lain sudah memimpin, giliran calon yang diusung PKS yang menang," tandas Asyik.

Senada dengan Presiden PKS, Ketua Badan Pemenangan

Pemilu Pusat DPP PKS Chairul Anwar juga meminta seluruh Anggota DPR RI dan DPRD untuk mengerahkan kemampuan yang dimiliki guna memenangkan Pilkada di tempatnya masing-masing.

"Ini lap terakhir yang mesti kita keluarkan semua yang kita miliki," tegas Anggota DPR RI asal Riau ini.

Chairul menyebut Safari Pemenangan Pilkada PKS akan digelar secara simultan di seluruh Indonesia. Presiden PKS, Sekjen dan pimpinan partai akan berkeliling ke wilayah-wilayah yang menggelar Pilkada.

"Guna mengobarkan semangat kader di bawah karena kita punya mesin partai sekaligus silaturahmi dengan tokoh, ulama dan tokoh umat di daerah untuk bersama-sama berjuang," ungkap Chairul.

Menanggapi Instruksi Presiden PKS tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat siap melaksanakan dengan terjun langsung menemui masyarakat untuk memenangkan calon yang diusung dan didukung PKS.

"Sesuai arahan Presiden



PKS bahwa Anggota DPR RI akan langsung terjun membantu Pilkada yang ada di daerahnya. Kita sudah melaksanakan dengan mengunjungi beberapa daerah seperti Dumai dan Inhu di Riau," ujar politisi asal Riau ini.

Syahrul mengaku akan terus melakukan kunjungan di seluruh wilayah di Riau yang menggelar Pilkada. Ia menyebut tanggapan masyarakat

terhadap calon yang diusung oleh PKS sangat positif.

"Apa yang jadi sikap PKS di nasional sangat berpengaruh terhadap calon yang diusung PKS dalam Pilkada. Ini yang ditunggu masyarakat Riau. Begitu juga hasil kerja kami selama setahun di DPR, masyarakat merespons positif dan saat kita turun masyarakat menyambut calon yang diusung PKS," sebut Syahrul.



Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen

Kunjungi

**KANAL RESMI
FRAKSI PKS
DPR RI**

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI